

SOSIOLOGI PERTANIAN

Penulis:

- **Amruddin**
- **Ismiasih**
- **Maman Haeruman Karmana**
- **Riky Welli Saputra**
- **Roosganda Elizabeth**
- **Muhammad Fadhli Fadhillah**

ISBN 978-623-8102-11-2



9

786238

102112

SOSIOLOGI PERTANIAN

**Amruddin
Ismiasih
Maman Haeruman Karmana
Riky Welli Saputra
Roosganda Elizabeth
Muhammad Fadhli Fadhillah**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

SOSIOLOGI PERTANIAN

Penulis :

Amruddin

Ismiasih

Maman Haeruman Karmana

Riky Welli Saputra

Roosganda Elizabeth

Muhammad Fadhli Fadhillah

ISBN : 978-623-8102-11-2

Editor : Ariyanto, M.Pd

Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Penyunting : Atyka Trianisa, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah

Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Judul
Sosiologi Pertanian

Penulis
Amruddin
Ismiasih
Maman Haeruman Karmana
Riky Welli Saputra
Roosganda Elizabeth
Muhammad Fadhli Fadhillah

Penerbit:
PT. Global Eksekutif Teknologi

ISBN: 978-623-8102-11-2

Edisi Indonesia
Sosiologi Pertanian

Editor : Ariyanto
Tri Putri Wahyuni
Cetakan : Pertama, November 2022
Penerbit : Global Eksekutif Teknologi
Jln. Pasia Sabalah No.34 Kec. Koto Tangah Kota Padang Telp.
+6281372200104
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

KREATOR	Amruddin ; Ismiasih ; Karmana, Maman Haeruman ; Saputra, Riky Welli ; Elizabeth, Roosganda ; Fadhillah, Muhammad Fadhli ; (Penulis)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Sosiologi Pertanian : editor, Ariyanto, Tri Putri Wahyuni
PUBLIKASI	Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022
DESKRIPSI FISIK	halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN
SUBJEK	

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
Kedalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Right Reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Sosiologi Pertanian.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Sosiologi Pertanian, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Desember 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 SOSIOLOGI SEBAGAI SUDUT PANDANG	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah dan Tokoh Sosiologi	3
1.3 Perspektif dalam Sosiologi	4
1.4 Paradigma dalam Sosiologi.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	9
BAB 2 INTERAKSI SOSIAL DAN STRUKTUR SOSIAL	10
2.1 Pendahuluan.....	10
2.2 Interaksi Sosial dan Proses Sosial	10
2.3 Syarat Terjadinya Interaksi Sosial	12
2.4 Bentuk Interaksi Sosial.....	13
2.5 Struktur Sosial	15
2.6 Stratifikasi Sosial Masyarakat Pertanian.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 3 KELEMBAGAAN PERTANIAN	20
3.1 Pendahuluan.....	20
3.2 Kelembagaan Pertanian.....	22
3.2.1 Dalam Bidang Produksi.....	22
3.2.2 Dalam Bidang Konsumsi.....	23
3.3 Kelembagaan dalam Penguasaan Lahan Pertanian.....	25
3.3.1 Penguasaan Kepemilikan Lahan	26
3.3.2 Kepemilikan dan Hak Penggarapan Lahan.....	28
3.4 Lembaga Kerjasama.....	32
3.5 Koperasi Pertanian	34
DAFTAR PUSTAKA.....	37
BAB 4 ORGANISASI.....	38
4.1 Pendahuluan.....	38
4.2 Apa Itu Organisasi ?	39
4.3 Pentingnya Organisasi	40
4.4 Dimensi Desain Organisasi.....	43
4.5 Dimensi Struktural Organisasi	44
4.6 Faktor Kontigensi	46
4.7 Hasil Kinerja Dan Efektivitas.....	48

4.8 Sebuah Contoh konfigurasi Organisasi	50
4.9 Desain Organisasi Organik Dan Organisasi Mekanistik.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BAB 5 STRATIFIKASI SOSIAL DAN KAITANNYA	
DENGAN DUNIA PERTANIAN	56
5.1 Konsep Stratifikasi Sosial	56
5.2 Pengertian Stratafikasi Sosial dan Kelas Sosial	58
5.2.1 Pengertian Stratafikasi Sosial	58
5.2.2 Pengertian Kelas Sosial.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BAB 6 RELASI KEKUASAAN DAN WEWENANG	
DALAM SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA.....	63
6.1 Pendahuluan.....	63
6.2 Indonesia dalam Identitas Agraris.....	64
6.3 Kekuasaan dan Wewenang dalam Aspek Sosiologi.....	68
6.4 Relasi Kekuasaan dan Wewenang dalam Sektor Pertanian di Indonesia	71
DAFTAR PUSTAKA.....	76
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Talcott Parsons, Tokoh Struktural-Fungsional	4
Gambar 1.2 : George C.Homans, Tokoh Teori Pertukaran Sosial	7
Gambar 1.3 : George Ritzer, Sosiolog Paradigma Terpadu..	8
Gambar 4.1 : Pentingnya Organisasi.....	41
Gambar 4.2 : Dimensi Struktural yang Berinteraksi dari Desain dan Faktor Kontinjensi.....	44
Gambar 4.3 : Kelompok Pemangku Kepentingan Utama dan Apa yang Mereka Harapkan ...	49
Gambar 4.4 : Lima Bagian Dasar Organisasi.....	50
Gambar 4.5 : Desain Organisasi Organik dan Organisasi Mekanistik.....	52
Gambar 6.1 : Hasil Survei Pertanian 2018	67

BAB 1

SOSIOLOGI SEBAGAI SUDUT PANDANG

Oleh Amruddin

1.1 Pendahuluan

Sosiologi berasal dari bahasa latin yang dari dua kata; Socius dan Logos. Secara harfiah atau etimologis kata socius berarti teman, kawan, sahabat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang berteman, berkawan, bersahabat atau suatu ilmu yang membicarakan atau mempelajari tentang masyarakat, atau ilmu pengetahuan tentang hidup bermasyarakat.

Sosiologi telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena sosiologi memiliki ciri-ciri utama, sebagai berikut :

1. Sosiologi bersifat empiris berarti ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan.
2. Sosiologi bersifat teoritis berarti sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori.
3. Sosiologi bersifat kumulatif artinya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
4. Sosiologi bersifat non etis artinya ilmu pengetahuan ini tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta yang ada secara analitis.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial. Maksudnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa/gejala sosial.
- b. Sosiologi bersifat kategoris (deskriptif), tidak normatif, artinya bahwa sosiologi membicarakan objeknya secara apa adanya.

- c. Sosiologi termasuk ilmu murni (pure science), bahwa sosiologi bukan ilmu praktis, artinya tujuan penelitian ilmu sosiologi semata-mata demi perkembangan ilmu itu sendiri, bukan untuk kepentingan kehidupan praktis.
- d. Sosiologi bersifat generalis (nometetis), sosiologi meneliti prinsip-prinsip umum saling hubungan manusia, bukan ideografis, yakni meneliti secara khusus peristiwa demi peristiwa.
- e. Sosiologi bersifat abstrak, hampir sama dengan generalis, perbedaan terletak pada penekanannya, yaitu pada wujud kesatuan yang bersifat umum atau terpisah-pisah.
- f. Sosiologi bersifat tradisional sekaligus empiris, artinya menyandarkan pada pemikiran logika sekaligus berdasarkan fakta/kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- g. Sosiologi merupakan ilmu yang umum (general), artinya sosiologi mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi manusia, bukan mempelajari ilmu dengan gejala khusus.

Sebagai halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang masyarakat oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup pelbagai faktor sehingga walaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Beberapa orang sarjana mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (society) diantaranya;

Mac Iver dan Charles C. Page yang mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkahlaku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial.

Ralp Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

1.2 Sejarah dan Tokoh Sosiologi

Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte (1789-1857) seorang filsuf Prancis ketika menerbitkan buku keduanya berjudul *Course de Philosophie Positive*. Walaupun demikian dalam buku *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* yang berbahasa Indonesiakan menjadi *Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka* yang ditulis oleh Peter Beilharz (2002), tidak ditemukan nama Auguste Comte.

Meskipun Comte memperkenalkan istilah sosiologi, akan tetapi Herbert Spencer (1820-1903) yang mempopulerkan istilah tersebut melalui bukunya *Principles of Sociology* (1898). Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat dengan menerapkan teori evolusi organik. Setelah buku tersebut terbit, sosiologi kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia.

Karl Marx (1818-1883) salah satu karya populernya adalah *Das Capital* (1867), Marx memberikan sumbangan bagi sosiologi dengan pandangannya bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yakni; kelas borjuis (kelompok yang menguasai alat-alat produksi) dan kelas proletar (kelompok rakyat jelata yang tidak memiliki alat-alat produksi).

Emile Durkheim (1858-1917) juga merupakan tokoh pelopor perkembangan sosiologi. Bukunya yang berjudul *The Division of Labor in Society* (1896) merupakan suatu upaya untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu tentang pembagian kerja. Menurut Durkheim, pembagian kerja berfungsi untuk meningkatkan solidaritas.

Tokoh terakhir yang dapat disebut tokoh sosiologi klasik adalah Max Weber (1864-1920). Salah satu buku Weber yang terkenal adalah *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904). Dalam buku tersebut Weber mengemukakan tesisnya mengenai keterkaitan antara etika protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat.

Jauh sebelumnya, seorang sarjana Arab yang lahir di Tunis, Ibnu Khaldun (1333-1406) menjadi pemikir besar dunia melalui bukunya “*Muqaddimah*” yang monumental mengenai sejarah umat manusia. *Muqaddimah*, mengemukakan pengaruh lingkungan fisik terhadap

manusia, bentuk organisasi sosial primitif, dan modern, hubungan antar kelompok dan berbagai fenomena kultural.

Di tanah air, tokoh terkemuka dalam sosiologi adalah Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, banyak ahli dikemudian hari mengutip pendapatnya tentang ilmu apa itu sosiologi, keduanya menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.

Rahardjo (2014) memberi penjelasan tentang perbedaan maupun persamaan antara sosiologi pedesaan dengan sosiologi pertanian. Pertama, sosiologi pedesaan lahir dan mengalami perkembangannya yang mantap sebagai suatu disiplin ilmu di AS sedangkan sosiologi pertanian lahir dan berkembang di Eropa (khususnya Jerman). Kedua, sosiologi pedesaan lahir terlebih dahulu daripada sosiologi pertanian, oleh karena itu sosiologi pedesaan lebih mantap sebagai suatu disiplin ilmu. Ketiga, sosiologi pertanian lahir dan berkembang sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi di Barat-Utara saat ini, khususnya dengan semakin menipisnya perbedaan antara desa dan kota.



Gambar 1.1 : Talcott Parsons, Tokoh Struktural-Fungsional

1.3 Perspektif dalam Sosiologi

Seperangkat asumsi kerja disebut suatu perspektif, suatu pendekatan atau kadang-kadang disebut juga paradigma. Menurut Horton dan Hunt (1993) perspektif-perspektif yang didapati dalam sosiologi, adalah perspektif evolusionis, interaksionis, fungsionalis dan konflik.

Perspektif evolusioner adalah perspektif teoritis yang paling awal dalam sosiologi. Didasarkan pada karya August Comte dan Herbert Spencer. Para sosiolog yang memakai perspektif evolusioner, mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda, untuk mengetahui apakah ada urutan umum yang dapat ditemukan. Perspektif evolusioner adalah perspektif yang aktif sekalipun bukan merupakan perspektif utama dalam sosiologi (Horton dan Hunt, 1993).

Perspektif interaksionis tidak menyarankan teori-teori besar tentang masyarakat karena istilah masyarakat, negara dan lembaga masyarakat adalah abstraksi konseptual saja sedangkan yang dapat ditelaah secara langsung adalah orang-orang dan interaksinya saja. Tokoh interaksi simbolik seperti G.H. Mead dan C.H. Cooley memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. mereka menemukan bahwa orang-orang yang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat dan yang paling penting melalui kata-kata secara tertulis dan lisan. Tokoh-tokoh yang termasuk perspektif ini adalah Berger dan Luckman, Erving Goffman dan Herbert Blumer.

Perspektif fungsionalis melihat suatu masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang. Para juru bicara perspektif ini adalah Talcott Parsons, Kingsley Davis, dan Robert Merton.

Perspektif konflik dikenal lebih luas terutama didasarkan karya Karl Marx, yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Para sosiolog dalam perspektif ini adalah C.Wright Mills, Lewis Coser serta Danrendorf. Para teoritis konflik melihat masyarakat berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas (Horton dan Hunt, 1993).

1.4 Paradigma dalam Sosiologi

Wirawan (2012) dalam buku Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma mengutip Thomas Khun (1993) menjelaskan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan (sosial) tertentu.

George Ritzer telah menjelaskan tiga paradigma yang dikenal dalam sosiologi selama satu setengah abad terakhir. Ketiga paradigma tersebut adalah (1) paradigma fakta sosial, (2) paradigma konstruksi sosial dan (3) paradigma kritis.

- 1) Paradigma fakta sosial melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Teori-teori besar dalam lingkup paradigma ini antara lain teori struktural fungsional, teori konflik, teori sistem dan teori-teori sosiologi makro lainnya. Tokoh sosiologi klasik yang memiliki pengaruh hingga saat ini adalah Karl Marx, Emile Durkheim, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.
- 2) Paradigma definisi sosial tidak berangkat dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu (Veeger dalam Wirawan, 2012). Menurut paradigma ini, proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber pada kemauan individu itulah yang menjadi pokok persoalan dari paradigma definisi sosial. Teori-teori dalam lingkup paradigma ini antara lain teori tindakan sosial (Max Weber), teori konstruksi sosial (Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman), teori interaksionalisme simbolis (George Herbert Mead), teori fenomenologi (Edmund Husserl), teori etnometologi (Harold Garfinkel) dan teori eksistensialisme (Soren Kierkegaard).
- 3) Paradigma perilaku sosial sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Dalam paradigma ini perilaku sosial itulah yang menjadi persoalan utama, karena dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Ritzer dan Douglas J. Goodman (2008) dalam Wirawan (2012), paradigma ini memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan

pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Teori-teori yang bernaung dalam paradigma ini adalah teori pertukaran sosial yang diperkenalkan oleh George C.Homans, teori pilihan rasional, teori sosial modern dan post modern serta teori strukturasi yang digagas Anthony Gidden.



Gambar 1.2 : George C.Homans, Tokoh Teori Pertukaran Sosial

Menurut Ritzer (2013), tidak ada dalam waktu dekat akan terjadi perdamaian paradigma sosiologi. Dalam waktu singkat tidak ada paradigma dominan dalam sosiologi. Alasan Ritzer (2013) pertama, jarang terjadi suatu ilmu didominasi oleh satu paradigma saja. Kedua, meskipun penganut masing-masing paradigma menyatakan mampu menyelesaikan segenap persoalan sosiologi, namun pendekatan mereka rupanya hanya cocok untuk bidang realitas sosial tertentu saja. Ketiga dan terpenting karena kesetiaan yang fanatis penganut paradigma itu terhadap politik dan tujuan paradigmanya masing-masing.

Paradigma perilaku sosial hanya tampil dengan kemampuan terbaik untuk menerangkan tingkah laku dan kemungkinan perulangan tingkahlaku. Paradigma definisi sosial sangat tepat untuk menerangkan konstruksi sosial dari realitas dan tindakan berikutnya. Paradigma fakta sosial hanya berperan baik kalau menjelaskan struktur sosial dan institusi sosial.



Gambar 1.3 : George Ritzer, Sosiolog Paradigma Terpadu

Ritzer (2013) memperkenalkan sosiologi berparadigma terpadu (ilmu pengetahuan berparadigma ganda). Paradigma terpadu menjadi jembatan terhadap tiga paradigma sebelumnya. Menurut Ritzer (2013), beberapa hal mesti mendapatkan perhatian, yakni;

- 1) Paradigma terpadu bukan dimaksudkan sebagai pengganti paradigma sosiologi yang sudah ada,
- 2) Inti paradigma terpadu terletak pada antar hubungan empat tingkat utama realitas sosial : makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif dan mikro-subjektif,
- 3) Paradigma terpadu sangat menekankan perhatian kepada sosiologi modern, juga mungkin diarahkan kepada realitas sosial tingkat makroskopik, tanpa mengabaikan adanya dan arti penting realitas sosial tingkat mikroskopik,
- 4) Empat tingkat realitas yang telah dikemukakan adalah pembagian konseptual bukan menggambarkan kenyataan sebenarnya,
- 5) Paradigma terpadu harus dibandingkan berdasarkan perjalanan waktu atau antara berbagai masyarakat,
- 6) Paradigma terpadu haruslah bersifat historis dan,
- 7) Paradigma terpadu harus mengambil manfaat dari logika dialektis, sekalipun penerimaan logika ini secara tulus mungkin akan terhalang oleh ideologi politik yang dihubungkan atau yang kadang-kadang sengaja ditanamkan ke dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Horton, P.B, dan Hunt, C.L 1993. Sosiologi. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Rahardjo. 2014. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (edisi keempat). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, G. 2013. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S 1995. Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.
- Wirawan, I.B. 2012. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial. Jakarta : Penerbit Kencana Predana Media Group.

BAB 2

INTERAKSI SOSIAL DAN STRUKTUR SOSIAL

Oleh Ismiasih

2.1 Pendahuluan

Manusia selama hidupnya akan selalu membutuhkan manusia lain. Segala sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia dapat tercukupi dengan baik karena keberadaan orang lain. Seorang pemimpin akan sukses membawa organisasinya kearah kemajuan karena kerjasama dengan para karyawannya, suatu keluarga akan mencapai keharmonisan karena adanya kerjasama antar anggota keluarganya, seorang petani dapat menghasilkan produksi dan produktivitas yang tinggi karena adanya kerjasama dengan petani lain dan dukungan dari kelembagaan pertanian. Dengan demikian seseorang dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan yang diinginkan karena adanya campur tangan orang lain.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup secara sendirian atau dengan kata lain membutuhkan keberadaan orang lain. Sejak dilahirkan manusia sudah dibantu oleh orang lain atau ada campur tangan orang lain untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain dengan cara-cara tertentu baik secara perorangan maupun secara berkelompok (bermasyarakat). Sudah menjadi hasrat dan naluri manusia untuk berdampingan dengan manusia lain dan dengan alam sekitarnya. Selama manusia ada, proses sosial dan interaksi sosial akan terus berlangsung secara dinamis dalam bentuk serta cara-cara yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan keinginan manusia.

2.2 Interaksi Sosial dan Proses Sosial

Proses sosial dijelaskan sebagai sistem atau cara yang dapat dilihat ketika seseorang atau sekelompok individu menjalin hubungan atau interaksi yang kemudian terbentuk hubungan tersebut dengan

cara-cara tertentu. Menurut Prihtanty (2014) proses social yang terjadi di masyarakat merupakan suatu hubungan yang harmonis yang terjadi diantara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok individu atau sebaliknya dan kelompok dengan kelompok. Individu akan mencoba beradaptasi dengan bermacam bentuk hubungan sosial yang ada disekitarnya. Proses sosial dijelaskan sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi atau hubungan timbal balik yang membentuk aksi dan reaksi antara berbagai macam bidang kehidupan. Atau dengan kata lain proses sosial dijelaskan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama (Soekanto, 2014).

Apabila seseorang berhubungan atau berinteraksi terhadap individu lain atau kelompok maka akan timbul respon dan tanggapan dari pihak lain atau sekelompok manusia yang ada disekitarnya, baik itu respon yang positif, negatif, baik atau buruk. Hubungan sosial secara umum diawali dengan adaptasi terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat. Setelah dipahami dan dimengerti oleh masing-masing pihak yang menjadi tujuan dan keinginan maka hubungan tersebut tidak hanya sekedar pertemuan secara fisik saja akan tetapi meningkat menjadi hubungan yang lebih intensif, misalnya menjalin kerjasama dalam menjalankan aktifitas untuk satu atau beberapa tujuan bersama.

Dasar dari bentuk proses sosial adalah terjadinya *interaksi sosial* (dasar proses sosial). Interaksi sosial merupakan kunci kehidupan dan dasar dari semua kehidupan sosial karena tanpa ada interaksi sosial maka kehidupan tidak akan mungkin ada. Kehidupan akan terus berlangsung selama masih ada interaksi social. Interaksi sosial merupakan bentuk atau produk dari proses social. Proses sosial memiliki sifat dinamis, artinya bahwa hubungan sosial tidak akan pernah diam (berhenti), ia akan terus berlangsung menyesuaikan dengan kondisi dan bentuk hubungan yang diinginkan oleh setiap individu atau masyarakat.

Proses sosial dijelaskan sebagai aspek dinamis dari kehidupan manusia. Proses hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk aksi dan reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara terus menerus (Frendly, Albertus; Asir, Annisa Ishmat; Muhyiddin, 2022). Apabila dua orang bertemu, mereka akan saling bertegur sapa, bersalaman, dan berkomunikasi satu sama lain. Aktifitas tersebut merupakan bentuk interaksi sosial.

2.3 Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Interaksi sosial bisa terjadi jika terpenuhi dua (2) syarat yaitu :

1. Kontak sosial

Kontak sosial berasal dari Bahasa latin *con* atau *cum* (yang memiliki arti bersama-sama) dan *tango* (yang memiliki arti menyentuh). Secara harfiah memiliki pengertian bersama-sama menyentuh. Namun dalam perkembangan sekarang ini orang dapat berhubungan satu sama lain melalui media telekomunikasi yang tidak memerlukan hubungan saling bersentuhan (Soekanto, 2014).

Berlangsungnya kontak sosial dapat terbagi ke dalam tiga (3) bentuk yaitu :

- a. Hubungan interaksi sosial antara individu dengan individu.
Interaksi sosial yang melibatkan antara individu dengan individu dapat terjadi misalnya komunikasi yang terjadi antara seorang ibu pada anaknya, kerjasama antara petani dengan penggarap, transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, seorang mahasiswa yang sedang diskusi dengan dosen, dan lain-lain.
- b. Hubungan interaksi antara individu dengan kelompok atau sebaliknya
Interaksi sosial yang melibatkan hubungan antara orang perorangan dengan kelompok atau sebaliknya dapat terjadi misalnya para murid yang sedang mendengarkan guru yang sedang mengajar di depan kelas, seorang pemimpin yang sedang memberikan tugas kepada para karyawannya, seseorang yang sedang berpidato di depan audience, dan lain-lain.
- c. Hubungan antara kelompok dengan kelompok
Interaksi sosial yang melibatkan hubungan antara kelompok dengan kelompok dapat terjadi misalnya hubungan kerjasama dagang antara perusahaan A dengan Perusahaan B, kerjasama yang dilakukan antara tim pengabdian dengan masyarakat yang diberdayakan, pertandingan olah raga antara Klub A dan Klub B, dan lain-lain.

Terjadinya kontak sosial tidaklah bergantung dari tindakan atau perilaku yang muncul, melainkan bisa dari tanggapan terhadap tindakan tersebut. Menurut sifatnya kontak sosial dapat bersifat positif dan negative. Kontak sosial yang bersifat positif jika interaksi sosial tersebut mengarah pada kegiatan yang berbentuk kerjasama, sedangkan yang bersifat negative apabila hubungan interaksi sosial tersebut mengarah pada suatu pertentangan/konflik atau pertikaian.

Suatu kontak sosial dapat juga bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi jika hubungan atau interaksi yang terjadi secara langsung atau dengan bertemu muka secara langsung (face to face), sedangkan kontak sekunder terjadi apabila hubungan interaksi berlangsung melalui perantara atau media, misalnya seseorang sedang berbicara dengan temannya yang ada diluar wilayah dengan menggunakan media komunikasi seperti media sosial atau media elektronik.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi/berita dari satu pihak kepada pihak lain, atau ketika seseorang memberikan arti atau tafsiran kepada perilaku atau perasaan orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut dan kemudian orang yang bersangkutan memberi reaksi (Soekanto, 2014). Pada kehidupan masyarakat yang masih terisolasi atau terasing seringkali komunikasi yang terjadi berjalan secara tidak sempurna, biasanya ditandai dengan suasana ketidakmampuan untuk mengadakan interaksi sosial.

2.4 Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk proses social sebagai akibat terjadinya interaksi sosial dapat digolongkan dalam dua macam yaitu :

1. Proses sosial yang asosiatif (*Processes of association*)

Bentuk interaksi social yang mengarah pada tindakan yang bersifat positif, dalam hal ini dikelompokkan menjadi :

a. Kerjasama

Merupakan bentuk hubungan interaksi social dengan melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama antara individu dengan

individu atau kelompok untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Faktor pendorong terjadinya bentuk hubungan kerjasama diantaranya : kepentingan pribadi, kepentingan umum, tuntutan keadaan, gotong royong, tolong menolong, musyawarah.

b. Akomodasi

Keadaan terjadinya keseimbangan baru dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok manusia setelah pihak yang berkonflik berbaikan kembali. Suatu kondisi yang menunjuk pada usaha seseorang atau kelompok untuk meredakan pertikaian/pertentangan untuk mencapai kestabilan atau kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang sebelumnya melakukan pertikaian/pertentangan. Bentuk akomodasi misalnya : kompromi, negosiasi, mediasi, toleransi.

c. Asimilasi

Proses ketika pihak-pihak dalam suatu interaksi mengidentifikasi kepentingan dan tujuan kelompok. Sekelompok orang dengan budaya yang berbeda secara terus menerus dan intensif berinteraksi dalam jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan budaya dari berbagai kelompok untuk berubah dan beradaptasi satu sama lain.

2. Proses sosial yang disosiatif (*processes of dissociation*)

Bentuk interaksi sosial yang mengarah pada tindakan yang bersifat negatif, dalam hal ini dikelompokkan menjadi :

a. Persaingan (*competition*)

Proses sosial ketika individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan untuk mendapatkan kedudukan dan peran dalam masyarakat.

b. Konflik

Merupakan interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Faktor pendorong terjadinya konflik diantaranya : penguasaan sumber ekonomi, lahan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya.

c. Pertentangan atau pertikaian

Merupakan sebuah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan saling menantang dengan ancaman dan kekerasan.

Faktor pemicu yang mempengaruhi munculnya konflik atau perselisihan adalah:

- 1) Perbedaan pendapat antar individu
- 2) Perbedaan budaya
- 3) Perbedaan kepentingan
- 4) Perbedaan kelas sosial
- 5) Perubahan sosial dalam masyarakat

Konflik umumnya terjadi di lingkungan terkecil, yaitu individu, dan mencapai lingkungan terbesar, yaitu masyarakat.

Konflik yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

1. *Elimination*, yaitu pengunduran diri pihak yang berkonflik.
2. *Subjugation*, yaitu hak individu atau kelompok untuk memaksakan ketaatan/ketaatan kepada orang lain atau pihak.
3. *Majority Rule*, yaitu jumlah suara maksimum yang diperlukan untuk keputusan akhir yang akan dipilih terlepas dari masukan/masukan argumen.
4. *Minority consent* (Minoritas setuju) bahwa mayoritas menang, tetapi minoritas tidak merasa kalah.
5. *Compromise* (Kompromi) artinya kedua belah pihak atau semua kelompok yang terlibat konflik berusaha mencari dan memperoleh jalan tengah terbaik bagi kedua belah pihak.
6. *Integration* (Integrasi) berarti membahas perbedaan pendapat, kemudian mempertimbangkan dan mengkajinya kembali hingga kedua belah pihak/kelompok mencapai keputusan yang terbaik dan memuaskan semua pihak.

2.5 Struktur Sosial

Struktur sosial adalah sistem yang dibangun secara sosial yang terdiri dari berbagai elemen yang membentuk masyarakat. Struktur mengacu pada elemen tetap atau stabil, seperti dengan membangun sebuah rumah. Struktur sosial adalah konstruksi tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ada empat elemen dasar struktur sosial, yaitu status sosial, peran, kelompok, dan

institusi. Dalam proses interaksi sosial, terdapat penghargaan terhadap sesuatu hal yang dianggap memiliki suatu nilai. Penghargaan yang lebih tinggi untuk sesuatu memberinya status yang lebih tinggi. Gejala-gejala ini menyebabkan munculnya kelas sosial, yaitu perbedaan status seseorang atau kelompok dalam posisi vertikal yang berbeda. Sistem lapisan dalam masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Siapa pun yang memiliki banyak barang berharga dianggap oleh masyarakat memiliki tempat di strata atas. Selain pembedaan masyarakat secara hierarkis dikenal pembedaan sosial yang sifatnya horisontal seperti agama, ras, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Struktur sosial memiliki banyak bentuk dalam masyarakat. Bentuk-bentuk struktur sosial adalah pelapisan sosial, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Perbedaan ketiga bentuk tersebut adalah status dan peran masing-masing individu dalam masyarakat. Menurut Soekanto, (2014), sesuatu yang dihargai dalam masyarakat dapat berupa harta, materi, atau benda-benda yang bernilai ekonomis, ilmu pengetahuan, kedudukan/jabatan, kekuasaan, dan keturunan dari keluarga yang terhormat. Pelapisan masyarakat merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat yang tersusun secara vertical (berjenjang). Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan *Social Stratification*.

Pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu berdasarkan :

1. Proses terjadinya

Menurut proses terjadinya stratifikasi sosial ada yang terjadi dengan sendirinya (alamiah) dan sengaja dibentuk (kesengajaan). Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya umumnya muncul bersamaan dengan proses pertumbuhan masyarakat. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya misalnya umur seseorang, keturunan dari keluarga yang terhormat, jenis kelamin, kepala suku dan sebagainya. Alasan yang menjadi sebab bisa berlainan dalam setiap masyarakat di daerah

Stratifikasi sosial yang sengaja disusun, umumnya terbentuk karena adanya suatu alasan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu, misalnya pemimpin, jabatan publik (pangkat dan golongan), kekuasaan, dan sebagainya yang tujuannya untuk mencapai sesuatu. Stratifikasi sosial tersebut setiap orang dapat mencapainya dengan suatu upaya atau usaha, sementara untuk stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mencapainya.

2. Sifatnya.

Stratifikasi sosial berdasarkan sifatnya dapat terbentuk melalui dua cara yaitu *Closed Social stratification* (tertutup) dan *Opened social stratification* (terbuka). *Closed Social stratification* (tertutup) merupakan stratifikasi yang tidak adanya kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Contohnya karena tingkatan umur, jenis kelamin, keturunan, dan lain-lain. *Opened social stratification* (terbuka) merupakan stratifikasi yang memungkinkan berpindahnya individu dari satu lapisan ke lapisan yang lain, contohnya kedudukan, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan lain-lain.

2.6 Stratifikasi Sosial Masyarakat Pertanian

Dalam masyarakat tradisional pelapisan sosial umumnya masih sederhana seperti berdasarkan pada jenis kelamin, usia, dan kekuasaan. Pada masyarakat modern pelapisan sosial sangat kompleks dan berdasarkan berbagai kategori. Menurut Yuliati, (2003), secara umum pelapisan sosial di masyarakat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu : berdasarkan derajat ekonomis, politis dan fungsional.

Pada masyarakat pertanian, dikenal adanya dua stratifikasi sosial masyarakat, yaitu satu kelas (*one class*) dan dua kelas (*two class*). Konsep satu kelas dan dua kelas dibedakan berdasar sistem kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian.

- a. Tipe “satu kelas” merupakan tipe dengan kepemilikan lahan pertanian rata-rata sama. Sehingga stratifikasi yang ada lebih bersifat horizontal.
- b. Tipe “dua kelas” merupakan tipe yang berciri dimana didalamnya terdapat sejumlah kecil petani yang memiliki lahan yang sangat luas dan sebagian lain merupakan petani yang

tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga muncul adanya kelompok petani penggarap dan petani pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

- Frendly, Albertus; Asir, Annisa Ishmat; Muhyiddin, Y. 2022. *Pengantar Sosiologi Pertanian*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Soekanto, S. 2014. *Sosiologi*. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Yuliati, Y. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. edisi ke 3. Malang: Pondok Pustaka Jogja.

BAB 3

KELEMBAGAAN PERTANIAN

Oleh Maman Haeruman Karmana

3.1 Pendahuluan

Pertanian adalah pembudidayaan tanaman maupun hewan berbasis lahan – tanah, dengan petani sebagai pelaku utamanya. Lahan adalah permukaan tanah terkait dengan ruang (*space*) dimana udara, sinar matahari dan hujan akan mempengaruhinya secara langsung, sementara dalam perut buminya itu sendiri, tanah dengan struktur, tekstur dan nutrisi yang dikandungnya akan menjadi media pertumbuhan tanaman. Petani sebagai pelaku utama dalam pertanian berhadapan dengan berbagai komponen alam (*nature*) yang pasif. Bagaimanapun perlakuan petani terhadap alam bisa terjadi dan baik – jeleknya hasil budidaya tanaman dan hewan yang diperoleh tergantung pada perlakuan petani terhadap komponen-komponen alam tersebut. Dalam membudidayakan tanaman maupun hewan, petani harus mempertimbangkan iklim, apakah dilakukan pada musim penghujan atau musim kemarau. Tanaman yang memerlukan banyak air, pembudidayaannya sebaiknya di musim hujan, demikian pula sebaliknya. Hasil pertanian jelek kalau perlakuan petani tidak sesuai atau cocok dengan kebutuhan tanaman dan hewan yang diusahakan. Kalau perlakuan yang mengakibatkan hasil tanaman dan hewan yang baik dilakukan berulang kali dan terus menerus, perlakuan petani tersebut jadi melembaga. Sesuatu yang sudah melembaga akan melahirkan norma-norma dan aturan main yang harus dipenuhi agar hasilnya tidak rusak atau mengalami kegagalan.

Interaksi antar individu atau interaksi individu dengan alam – tanah, tanaman telah melahirkan perilaku yang terbiasakan sehingga mewujudkan kelembagaan. *Say hello*, atau bersalaman ketika bertemu kawan yang terbiasa dilakukan menjadi wujud kelembagaan. Dalam pertanian, diawali dengan pengolahan tanah – ngawuluku dan ngangler (Sd) disertai perja petani dengan cangkulnya yang sudah terbiasa dilakukan sebelum padi ditanam (tandut, Sd). Dulu-dulu, setelah padi ditanam sampai dengan dipanen pekerja yang terlibat adalah

perempuan-wanita. Untuk membersihkan gulma-tanaman pengganggu yang tumbuh sekitar tanaman padi dibersihkan dengan cara .ngarambet (Sd). Setelah padi matang dipanen perempuan - ibu-ibu memotong padi menggunakan ani-ani (etem Sd). Untuk melepaskan bulir gabah dari tangkainya perempuan mengirikinya, dimana dengan kedua kakinya, malai padi yang dipanen diinjak-injak. Gabah hasil pengirikan dikumpulkn untuk satu saat, manakala hari panas, gabah dijemur sehingga kering karena terik matahari. Gabah yang sudah kering pada gilirannya akan ditumbuk di lesung dengan menggunakan alu (halu Sd). Bulir beras dan sekam hasil dari gabah yang ditumbuk dipisahkan dengan cara ditapi (Sd) dengan niru (nyiru Sd). Dari gabah yang ditumbuk mungkin ada beras yang pecah kecil-kecil disebut beunyeur (Sd).

Seluruh pekerjaan dari sejak padi ditanam sampai gabahnya ditumbuk, dilakukan oleh perempuan/wanita. Keterlibatan laki-laki hanya apabila memerlukan tenaga besar, seperti mengngkut dan memikul. Akan tetapi, dengan muncul dan berkembangnya teknologi dalam budidaya padi, pekerjaan menyangkut atau membersihkan gulma diganti dengan menggunakan gasrok atau lalandak yang memerlukan tenaga besar sehingga dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula dalam panen banyak yang ditebas menggunakan arit dilakukan oleh laki-laki karena butuh tenaga besar. Perontokan gabah yang asalnya diirik - diinjak-injak dengan kaki diubah dengan menggunakan mesin perontok. Gabah yang sudah kering juga tidak ditumbuk, melainkan digiling dengn rice milling unit jadi beras. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dengan berkembangnya teknologi budidaya dalam pengolahan padi, peran tenaga wanita/perempuan banyak tergantikan oleh tenaga laki-laki dan mesin. Di beberapa daerah di Jawa Barat, dalam upaya mempertahankan eksistensi keterlibatan tenaga kerja perempuan/wanita dalm budidaya padi, dikenal istilah ceblokan. Melalui system ceblokan, ibu-ibu/perempuan melakukan tandur - tanam padi dan penyiangan tanpa dibayar, tetapi waktu panen tidak boleh dilakukan pihak lain, tetapi oleh ibu-ibu/perempuan yang nyeblok terebut!

3.2 Kelembagaan Pertanian

3.2.1 Dalam Bidang Produksi

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktikkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dalam bidang pertanian di perdesaan. Kebiasaan ibu-ibu/perempuan dulu menumbuk padi tercermin dalam seni-budaya ngagondang dan tutunggulan (Sd). Di kalangan orang Sunda di Jawa Barat, sebelum berkembangnya pola sawah, dulu-dulunya terbiasa mengusahakan padi ladang (ngahuma Sd). Di kalangan masyarakat adat di Cisolok – Sukabumi Selatan dan masyarakat Baduy di Banten, sistim ngahuma ini masih dipertahankan. Oleh karena padi ladang yang diusahakan itu padi local yang dipertahankan dalam wujud geugeusan (padi gabah dengan tangkainya) dan setelah kering dijemur dan diangin-angin disimpan di lubang (leuit Sd). Padi yang disimpan dalam bentuk geugeusan (Sd) ini - bisa bertahan lama sampai sepuluh tahun lebih. Di awal kemerdekaan Vietnam tahun 1972, dimana rakyatnya waktu itu banyak mengalami kelaparan, padi lumbung dari Cisolok inilah yang dikirimkan menolong mereka. Oleh karena mereka merasa telah ditolong-diselamatkan, orang Vietnam sampai bilang, kalau orang Indonesia membutuhkan padi-beras, sebagai utang-budi, bagaimanapun mereka akan berusaha membantu dan mengusahakannya!.

Keberadaan padi huma atau padi ladang, karena sumber airnya dari air hujan, maka diusahakannya pada musim hujan. Dulu sebelum adanya pergeseran iklim, musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret (OMar). Sedangkan dari April sampai dengan September musim kemarau (ASep). Pergeseran iklim terjadi akibat pemanasan global dan efek rumah kaca. Pada bulan Agustus 2022 saat tulisan ini dibuat, di Bandung dalam beberapa hari ini turun hujan, padahal menurut merhitungan musim dulu, bula Agustus ini seharusnya kemarau. Pola tanam palawija, hortikultura dan sayur mayur juga terpengaruh sekali. Kalau tanaman itu, seperti cabai, membutuhkan kondisi kering sementara hujan turun, tentu saja tanaman tersebut akan menjadi rusak. Sebaliknya dengan padi sawah yang memerlukan genangan air atau macak-macak, kebutuhan airnya perlu banyak. Keberadaan sistim irigasi diperlukan sekali bagi

keberlangsungan padi sawah, seperti pesawahan di Jawa Barat bagian utara, dari sejak Kabupaten Karawang, Subang, dan sebagian Indramayu bagian barat memperoleh pasokan air irigasi Jatiluhur. Sementara Indramayu bagian timur dan Cirebon mendapat pasokan air dari Waduk Jati Gede dan Kabupaten Kuningan. Sawah-sawah yang memperoleh pasokan air irigasi ini Index Pertanamannya (IP) sekitar 200 bahkan ada yang berupaya mengusahakan tiga kali pertanaman dalam setahun (IP 300) dan kalau padinya genjah (Sd) mungkin IP-nya bisa 400. Pengaturan pembagian air irigasi di perdesaan dilakukan oleh Ulu-ulu dan Mitra Cai. Sistim Subak, terkait dengan adat dan kepercayaan di Bali, mengatur pola pengairan padi sawah sangat baik dan teratur, sehingga menjadi kunci keberhasilan pengembangan pola persawahan. Hal ini terjadi pula pada pengembangan persawahan di daerah transmigrasi di Luar Jawa yang ada petani Balinya. Masalah pengaturan dan pembagian air irigasi ini, terutama di daerah pesawahan, sangat sensitif sehingga tidak jarang menimbulkan konflik bahkan pertengkaran di antara petani.

3.2.2 Dalam Bidang Konsumsi

Berkembangnya pembudidayaan berbagai jenis tanaman tidak sebatas menghasilkan produksi fisik. Dalam perkembangannya pertanian telah berkembang sebagai unit bisnis. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dikembangkan telah mengarah pada pengembangan unit bisnis pertanian – agribisnis. Penggunaan tenaga kerja maupun input-input fisik lainnya seperti bibit atau benih, pupuk, pestisida, fungisida, herbisida maupun input lainnya secara ekonomis harus diperhitungkan efisiensi dan untung ruginya karena yang dikejar adalah keuntungan. Pertimbangan terhadap semua ini tidak mudah, karena banyak itulah diantara petani, terutama petani kecil yang berlahan garapan sempit, pemikirannya tertumpu pada pemenuhan kebutuhan subsistennya, terutama pangan, khususnya padi. Di kalangan mereka padi dipandang sebagai tanaman penyelamat – penyelamat terhadap pemenuhan kebutuhan perut mereka. Celakanya orang Indonesia telah terjebak pada pemakan nasi beras tertinggi di dunia. Tahun 1986 saja konsumsi per kapitanya sekitar 145 kg/kapita/tahun. Propinsi Aceh malah tertinggi, mencapai 200 kg/kapita/tahun. Saat ini konsumsi beras orang Indonesia masih di atas 100 kg/kapita/tahun, sementara Negara-negara tetangga

Malaysia, Thailand, Vietnam konsumsinya pada kisaran 60 - 70 kg/kapita/tahun. Pertanyaannya, mengapa orang Indonesia demikian melembaganya terhadap konsumsi beras, sampai muncul ungkapan “kalau belum makan nasi beras belum makan”!. Meningkatnya konsumsi beras di Indonesia tidak terlepas dan sebagai akibat dari pengembangan varietas padi unggul (high yielding varieties/HYV) tahun 1965, setelah Peristiwa Gestapu (Gerakan Tiga Puluh September). Melalui Program BIMAS (Bimbingan Masal) Petani padi sawah di seluruh Indonesia dianjurkan dan didorong untuk menanam padi varietas unggul PB5 dan PB8 melalui penerapan teknologi Panca Usaha, yang mencakup:

- 1) Penggunaan bibit unggul (PB5 atau PB8)
- 2) Pengolahan Tanah yang baik
- 3) Pemupukan yang tepat
- 4) Pengendalian hama penyakit tanaman
- 5) Pengairan atau irigasi yang baik

Penulis waktu itu ditugaskan melaksanakan program ini di Desa Sukamelang dan Belendung, Kabupaten Subang. Produksi padi yang asalnya 2 – 3 ton per hektar meningkat menjadi 4 – 5 ton per hektarnya. Tetapi, apa yang terjadi? Nasi beras PB5 dan PB8 itu ternyata pera (*bear Sd*) dan untuk membikin perut kenyang jumlahnya harus banyak! Dengan bergulirnya program ini konsumsi masyarakat pun meningkat! Selain itu program pengembangan padi unggul ini pun dilaksanakan di daerah dan kalangan masyarakat tani bukan pengkonsumsi beras, seperti di Kepulauan Maluku dan Seram yang terbiasa mengkonsumsi sagu, juga di Nusa Tenggara yang terbiasa mengkonsumsi jagung. Dengan kata lain, akibat pengembangan beras varietas unggul ini banyak warga masyarakat yang biasanya makanan pokoknya bukan beras beralih ke beras. Hal inilah yang mengakibatkan kebutuhan beras Indonesia sangat besar! Ujung-ujungnya, sampai saat ini, untuk menutupi kekurangan, Indonesia masih harus mengimpor beras! Sementara itu tanaman-tanaman sumber karbohidrat pengganti beras di Indonesia ini cukup banyak, ada tanaman sereal, umbi-umbian, sagu, talas, sukun dan banyak lagi.

Berdasarkan pengalaman di negara lain, seperti di Amerika Serikat, perubahan pola konsumsi itu terjadi di kalangan anak-anak. Anak-anak sekolah dasar di Amerika Serikat belajarnya dari pagi

sampai jam empat sore (*full day school*). Mereka terbiasa makan siang di sekolah, bahkan di tengah hari setelah makan siang sempat knap (tidur sejenak) di mana saja, di koridor dan tempat lainnya di sekolah. Setelah mereka bangun, mereka jadi segar lagi belajar dan bermain. Pada waktu makan siang itulah anak-anak terbiasa dengan menu makanan yang disajikan pihak sekolah baik berupa roti, kentang dan makanan lainnya yang mungkin berbeda dengan makanan mereka di rumah. Melalui pola pendidikan semacam inilah kebiasaan anak-anak mengkonsumsi makanan jadi berubah. Perubahan pola konsumsi anak-anak ini terbawa sampai mereka pulang ke tanah air. Atas dasar pengalaman itu, kebiasaan makan yang terjebak pada makan nasi-beras diubahnya harus dari sejak kecil. Mereka harus akrab dengan makanan umbi-umbian, buah-buahan atau sereal lainnnya yang ada dan dihasilkan Negara kita, di luar nasi-beras. Saat ini di kalangan masyarakat kita kelihatan ada pergeseraan, yaitu ke makanan-makanan berbahan baku gandum yang justru harus diimpor! Mie, roti, pizza demikian populer! Bisakah bahan bakunya diganti dengan tepung dari berbagai jenis tanaman yang ada di Indonesia?! Penulis berpendapat itu bisa dilakukan, tergantung bagaimana kita meramunya!. Ketergantungan orang Indonesia pada pangan pokok beras bagaimanapun harus digeser ke sumber pangan karbohidrat lainnya. Diversifikasi pangan bagaimanapun harus dikembangkan melalui berbagai program, tetapi harus dijaga agar bahan pangan tersebut yang ada dan dihasilkan oleh Negara kita sendiri – bukan yang diimpor! Pengembangan industry kuliner – makanan berbahan baku local harus diprioritaskan agar memberi peluang yang lebih besar bagi terwujudnya diversifikasi pangan bagi warga masyarakat Indonesia sendiri dan kelebihannnya syukur-syukur menjadi komoditas ekspor yang menghasilkan devisa bagi Negara.

3.3 Kelembagaan dalam Penguasaan Lahan Pertanian

Di awal sudah diungkapkan bahwa pertanian adalah budidaya tanaman dan hewan berbasis lahan. Dalam kenyataannya banyak sekali petani yang berlahan garapan sempit. Hal ini terjadi karena di Indonesia berlaku sistim waris tanpa batas. Betapa pun sempitnya lahan petani, kalau meninggal langsung bagi waris. Setiap ahli warisnya memperoleh bagian kecil. Berbeda dengan

fenomena di Jepang, kalau lahan petani 5 hektar, manakala petaninya meninggal, lahan tersebut hanya diwariskan ke salah seorang ahli waris, dan ahli waris lainnya sebagai pemegang saham. Jadi lahan pertanian yang 5 hektar tersebut tidak dipecah! Lain halnya dengan lahan-lahan pertanian di Indonesia yang makin menyempit. Rata-rata penguasaan lahan di Jawa Barat mungkin hanya 0,3 hektar. Sempitnya lahan yang diusahakan petani, bagaimana pun mengarah ke ketidakefisienan (*in-efficiency of size*) dan manakala digabung dengan penggunaan input lainnya akan menciptakan skala usaha yang tidak ekonomis (*small scale of business*). Petani yang menyadari bahwa lahan yang diusahakannya itu tidak ekonomis, banyak yang memutuskan untuk dijual saja, dan hasil penjualan tanahnya dijadikan modal usaha di luar pertanian. Jadi dalam lahan pertanian di Indonesia ini terjadi “negative agricultural ladder” – tangga pertanian menurun dalam luasannya. Selain itu, status penguasaannya pun bisa menurun, dari asalnya memiliki lahan, mungkin beralih menjadi penyewa dan kalau tidak berhasil juga, berujung jadi buruh tani!

Kelembagaan di perdesaan adalah bagian integral dari kondisi social-ekonomi masyarakat yang berlaku yang muncul dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Berkembangnya kelembagaan ini dipengaruhi oleh beberapa komponen budaya, termasuk keberadaan sumberdaya, teknologi, tatanilai dan kepercayaan. Pada gilirannya, justru kelembagaan ini yang akan mempengaruhi komponen-komponennya. Pembangunan pertanian dengan perangkat perubahan teknologi dan pasar akan berpengaruh pada preferensi petani terkait dengan penguasaan lahannya maupun pendapatan yang mereka peroleh. Eksplorasi dari penataan kelembagaan dapat mempercepat pembangunan karena produktivitas tanamannya meningkat (Stevens and Jabara (1988).

3.3.1 Penguasaan Kepemilikan Lahan

Wiradi dan Makali (1984) memaparkan berbagai status penguasaan kepemilikan lahan yang berhubungan hukum dari Barat atau terkait dengan Hukum Adat setempat. Di antara keduanya ada perbedaan. Contohnya hukum memiliki lahan (*eigendom*) tidak diketahui sebelum Hukum Agraria jaman kolonial

1870. Setelah itu muncul berbagai istilah seperti kepemilikan lahan warisan, lahan komunal, lahan yang dimiliki secara absolut (*eigendom*) dan lahan dengan hak ulayat. Waktu Hukum Agraria muncul tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria 1960 / UUPA) menggantikan yang terdahulu, beberapa bentuk kelembagaan penguasaan kepemilikan lahan terdahulu masih diberlakukan, seperti:

- 1) Lahan Yasan yang dikuasai seseorang pada waktu membuka hutan dan menggarapnya, orang tersebut berhak memiliki lahan yasan tersebut. Menurut UUPA 1960, kepemilikan Yasan tersebut diakui dan bisa dialih-tangankan (*transferable*) seperti dijual atau disewakan.
- 2) Kasikepan atau Gogolan, kebanyakan dalam wujud lahan pertanian yang dimiliki orang desa. Penggarapan lahan tersebut dibagikan di antara penduduk inti yang disebut sikep atau gogol. Lahan kasikepan atau gogolan ini tidak boleh dialih-tangankan ke pihak lain. Siapa saja yang disebut sikep/gogol itu adalah:
 - Orang-orang yang mengurus tugas desa, seperti ronda malam, orang yang memelihara saluran air irigasi
 - Orang tersebut sudah kawin/berkeluarga
 - Orang tersebut memiliki rumah dan pekarangan
 - Ada persetujuan dari anggota kasikepan/gogolan terhadap orang tersebut.
- 3) Titisara adalah lahan pertanian milik pemerintah desa. Lahan ini biasanya disakapkan atau disewakan kepada penggarap melalui sistim lelang. Hasil yang diperoleh menjadi pendapatan desa untuk membiayai pengeluaran pemerintahan desa.
- 4) Bengkok, kebanyakan dalam bentuk sawah yang digarap sebagai upah/gaji petugas desa, terutama Kepala Desa/Lurah. Endresume I., seperti dikutip Kano (1977), menyebutkan bahwa diakhir abad 19, 35 % dari desa-desa di Jawa tidak memiliki bengkok. Di desa-desa itu gaji atau upah bagi petugas desa dan Kepala Desa/Lurahnya berasal dari kontribusi/sumbangan penduduk inti dalam bentuk padi-beras yang disebut *Pancen*.

3.3.2 Kepemilikan dan Hak Penggarapan Lahan

Berdasarkan kepemilikan dan hak penggarapan atas lahan tersebut, status pengusaahanya terbagi menjadi:

1) Pemilik Penggarap (*Owner operator*)

Dalam sistim pemilik penggarap , petani memiliki dan menggarap lahannya dengan tenaga keluarganya sendiri, oleh buruh tani, atau petani sendiri dibantu buruh tani. Berdasarkan status ini petani berperan sebagai tuan tanah yang secara bebas dapat menentukan jenis tanaman yang akan ditanam, input yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin Dengan nberasumsi dicapai, apakah memaksimumkan output, penerimaan, atau keuntungan. Fenomena di lapangan, kepemilikan lahan tidak sama, ada yang sempit, ada pula segelintir petani yang lahannya luas. Di Inddonesia, khususnya di P. Jawa kepemilikan lahan kebanyakan sempit, mungkin terkait dengan sistim waris tanpa batas yang terdahulu dikupas. Bagaimanapun lahan adalah asset paling penting dalam pertanian. Oleh karena itu kalau ada peraturan atau Undang-undang terkait dengan kepemilikan lahan dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya maupun distribusi kekayaan petani. Atas dasar sumberdaya tenaga kerja, Currie (1981) membedakan petani kapitalis dan petani kecil (peasant). Petani kapitalis menyandarkan sepenuhnya pada pekerja dan buruh tani yang dibayar. Sementara petani kecil (peasant) menyandarkan pada tenaga keluarga walaupun sewaktu-waktu ditambah tenaga buruh tani. Dengan mengasumsikan petani kapitalis hanya memiliki lahan dan capital finansial, maka dia akan menyewa buruh selama jangka waktu produksi. Pertimbangan kritisnya adalah pada saat dia harus membayar upah buruh pekerjaanya dengan penerimaan hasil penjualan produknya. Tujuan petani kapitalis adalah memaksimumkan total penerimaan dari kapital yang digunakannya. Di antara petani kapitalis mungkin ada perbedaan sikap dan pandangan yang berbeda terhadap risiko dan ketidak pastian usahataninya. Sementara petani kecil, dalam menggarap lahannya menyandarkan pada tenaga keluarga. Ada kemungkinan petani kecil (peasant) pun menggunakan buruh/pekerja dari luar kaarena petani kecil itu

sendiri terlibat dengan pelerjaan luar usahatani. Terkait dengan hasil pertanian yang diperolehnya, mungkin sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual. Tindakan yang mungkin diambil petani kecil, sebagian besar tergantung pada kondisi pasar dari sumberdaya produktif yang dimilikinya (Currie,1981).

2) Penyewa (*Fixed rent tenancy*)

Dalam sistim sewa, hak kepemilikan pemilik lahan sementara ditransfer ke penyewa. Lahan pertanian yang disewa akan digarapnya karena si penyewa sudah membayar sewa lahannya kepada pemilik lahan (Ghatak and Ingersent, 1984). Menurut Wiradi dan Makali (1984), transfer lahan garapan itu sementara, tergantung pada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penyewa. Bentuk pembayaran sewa lahan pertanian, secara historis dianalisis oleh Currie (1981), bisa dalam bentuk pelayanan kerja, produk pertanian yang dihasilkan atau bentuk tunai. Bentuk pembayaran pelayanan kerja terjadi terkait dengan sistim feodal. Sedangkan pembayaran dengan produk yang dihasilkan atau dalam bentuk uang tunai mungkin tidak tergantung pada hasil panen ataupun harganya. Di P. Jawa, sistim pembayaran sewa yang berlaku dilakukan ada yang setelah panen dan ada pula yang dibayarkan sebelum lahan digarap. Pembayaran sewanya, untuk kasus padi sawah, bisa dalam bentuk padi atau uang tunai. Periode waktu penyewaan ada yang musiman dan ada pula yang tahunan. Nilai sewa lahan bisa ditentukan oleh berbagai factor, seperti kelas lahan, produktivitas lahan, irigasi, musim yang kesemua itu berpengaruh pada produktivitas tanaman (Wiradi dan Makali 1984).

3) Gadai (*Pawned tenancy*)

Dalam sistim gadai, lahan pertanian digunakan sebagai deposit atau jaminan bagi sejumlah uang yang dipinjam. Dalam tahun 1960 sistim gadai ini berdasarkan Undang-undang dilarang. Akan tetapi, karena sistim kredit formal dari Bank atau melalui Koperasi masih sulit karena factor spatial – jarak dan kendala administrative, para petani terbiasa melakukan pinjaman informal melalui sistim gadai. Kano (1984) mengutip dari laporan Eindresum I, memperlihatkan bahwa dari 90

kasus sistim gadai di P. Jawa, 74 di antaranya terjadi di Jawa Barat. Fujimoto (1986) mendefinisikan sebagai jaminan-hipotek (*mortgage*) dimana hak penggunaan lahan (*usufructuary right*) dalam waktu tertentu ditransfer ke si pemberi kredit/pinjaman. Sistim gadai ini tidak hanya pada lahan sawah, tapi juga pada lahan kering di pegunungan. Dalam sistim gadai ini tidak ada bunga pinjaman yang menurut pandangan Islam adalah riba. Hayami dan Otsuka (1993) dalam penelitiannya di Kabupaten Garut – Jawa Barat, melaporkan kasus gadai di lahan kering sebagai suatu bentuk yang unik karena sistim gadai ini dipandang sebagai lembaga kredit dan lembaga penguasaan lahan. Bentuk kontrak tertulisnya dalam sistim gadai dibuat dalam transaksinya. Menurut Wiradi dan Makali (1984), terdapat dua motivasi yang berbeda dalam sistim gadai lahan. Petani yang berlahan garapaan luas menggadaikan lahannya untu maksud yang produktif, seperti membeli lahan yang baru, sementara di kalangan petani kecil mengarah pada tujuan konsumtif. Justru karena itu, sistim gadai di kalangan petani kecil banyak yang “mencelakakan” karena mereka tidak mampu mengembalikan uang gadai pinjamannya sehingga lahan yang digadaikannya lepas.

4) Penyakapan (*Sharecropping*)

Sistim penyakapan berbeda dari penyusahaan laahan terdahulu karena didasari kontrak terhadap proporsi dari output yang dihasilkan dalam musim tanam tertentu. Pada umumnya, dalam sistim penyakapan, si penyakap menyuplai tenaga kerja sedangkan pemilik laahn menyuplai lahan sakapan. Sistim penyakapan dipandang sebagai teka-teki teori yang menarik dari sudut pandang ekonomi neo-klasik. Sementara di kalangan Marxian memandangnya sebagai bentuk eksploitasi yang menindas. Teka-teki penyakapan, menurut Ellis (1988) terletak pada ketidak-mampuan analisis ekonomi biasa menjelaskan aspek-aspek kelembagaan ini:

- a. landasan pemikiran untuk menuduh bentuk kelembagaan ini tidak efisien dan kurang terbuka bagi inovasi dibandingkan dengan kelembagaan penguasaan lahan lainnya,

- b. keberadaan secara historis yang terus-menerus keberadaannya pada lokasi yang sama, berdampingan dengan petani kapitalis maupun dengan lahan-lahan yang disewa,
- c. kebiasaan berbagi hasil antara pemilik lahan dengan penyakap, misalnya “nengah” (fifty-fifty) yang tidak mampu dijelaskan hanya dengan kriteria optimisasi.

Pandangan eksploitasi terhadap penyakapan karena terkonsentrasi pada kekuatan ekonomi si pemilik lahan mengendalikan penyakap dan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Jalinan antara dua sudut pandang terhadap penyakapan – teka-teki ekonomi dan eksploitasi – ditemukan dalam konsep pasar factor yang saling mengunci (interlocking factor market). Dalam kaidah ekonomi Islam, bentuk penyakapan ini memenuhi kaidah Ekonomi Syari’ah, dimana antara pemilik lahan dan penyakap ada kesepakatan pembagian biaya input dan hasilnya. Dalam sistim nengah (Sd) – *fifty-fifty* basis pembagian biaya input dan hasilnya dibagi rata antara pemilik dan penyakap. Kalau biaya input dipikul oleh penyakap, hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk penyakap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan (mertelu Sd). Pada saat ini lahan-lahan pertanian di perdesaan banyak dimiliki oleh orang kota, seperti di Cisaat- Sukabumi, hampr semua lahan pertaniannya berupa lahan guntai yang dimiliki oleh orang-orang Jakarta. Karena pemilik lahannya bukan petani dan tinggalnya jjaauh di kota, pada saat musim tanam, penggarapan lahan maupun input-inputnya biasa dibebankan kepada penyakap. Pemilik mungkin hanya memperoleh $\frac{1}{4}$ dari hasil produksinya (marapat Sd). Motivasi pemilik lahan kayanya hanya sekedar “menitipkan” lahan miliknya.

Ruwetnya penyelenggaraan penyakapan, menurut Ellis (1988), perlu diperhatikan benar, karena pemahaman teoritisnya menjadi simplifikasi:

- a. Walaupun ini memang simple, mencakup transaksi simultan daklam dua pasar input, lahan dan tenaga kerja.
- b. Kontrak penyakapan yang rutin dilakukan cakupannya menjadi lebih luas, mencakup pinjaman konsumsi, kredit produksi, pelayanan oleh anggota keluarga penyakap kepada pemilik lahan, pembagian biaya untuk input tidak tetap (variable inputs) dan banyak lagi perlakuan lainnya.

- c. Penyakapan tidak selalu memiliki perbedaan yang berarti antara mereka yang memiliki lahan dan tidak memiliki lahan. Tetapi, dari banyak kasus penyakapan di P. Jawa memperlihatkan sebagian besar penyakapan justru dilakukan oleh penyakap yang memiliki lahan, sehingga dengan pola seperti ini kesenjangan pendapatan di antara kedua kelompok itu tak terhindarkan

3.4 Lembaga Kerjasama

Bentuk kerjasama tradisional yang tercermin dalam berbagai kegiatan di kalangan masyarakat tani di perdesaan adalah gotong royong. Petani waktu membangun rumah di perdesaan banyak dilakukan melalui sistim gotong royong, demikian pula dalam pemeliharaan saluran air, pembuatan jalan dan fasilitas umum lainnya di perdesaan. Di sementara daerah, waktu mengolah lahan dikenal istilah "*liliuran* (Sd)", dimana secara bergilir beberapa orang petani mengolah lahan, sehingga mereka tidak usah menggunakan buruh tani yang harus dibayar. Dalam kegiatan penyuluhan supaya seorang penyuluh dapat memberikan penyuluhan kepada banyak petani, maka dibuat kelompok tani. Beberapa tipe kegiatan kelompok (*Types of Group Action*), menurut Mosher (1966), sebagai berikut:

- 1) Membangun fasilitas masyarakat, seperti jalan, sumur, saluran pembuangan air, bangunan sekolah, klinik dan bangunan masyarakat lainnya yang dananya dari masyarakat itu sendiri.
- 2) Pengendalian hama, seperti tikus, burung predator, berbagai jenis serangga dan untuk efektifnya kadang-kadang kerjasama dengan daerah=daerah sekitarnya.
- 3) Organisasi koperasi formal dipandang sebagai kegiatan kelompok yang lebih terorganisir dan kegiatannya berkesinambungan dengan menangani beberapa fungsi, seperti pemasaran produk pertanian, pembelian peralatan pertanian, pemberian kredit bagi individu petani. Kesemua itu memerlukan pekerjaan dan administrasi yang cukup rumit. Pemaparan lebih lanjut mengenai koperasi diungkapkan pada bagian khusus berikutnya.

4) Pemerintahan local mandiri.

Masyarakat yang terorganisir memerlukan pengaturan terhadap berbagai aspek kehidupan terkait dengan kehidupan masyarakatnya. Hukum dan aturan main perlu diberlakukan untuk mengelola proyek-proyek pembangunan masyarakat. Pajak yang dihimpun disalurkan ke Pemerintah Pusat, masyarakat kadang tidak tahu berapa besar pajak yang terhimpun, demikian pula mengenai alokasi penggunaannya. Di sebagian besar dunia, petani tidak memiliki pemerintahan local mandiri yang memiliki kemampuan untuk menghimpun pajak dan menentukan alokasi penggunaannya dengan melibatkan kegiatan masyarakat lokal untuk menanganinya. Masyarakat lokal dapat membangun sekolah, membangun jaringan irigasi, jalan dan mempekerjakan penyuluh.

Pemerintahan llokal mandiri penting bagi terbangunnya politik masyarakat terkait dengan pembangunan pertanian, maupun bidang ekonomi lainnya. Bila keputusan pemerintah dibuat oleh pusat pemerintahan yang jauh, masyarakat umumnya hanya memahami sedikit saja terhadap apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya bila pemerintahan local mampu membuat keputusan, warganya memiliki kesempatan yang lebih baik memahami pemahaman politiknya. Tindakan apa pun yang diambil pemerintah local adalah hasil jerih payah pemikiran mereka terkait dengan masalah local yang dihadapi. Pemerintah pusat lebih berhubungan dengan masalah Negara yang lebih luas yang harus dihadapi dalam skala nasional.

1) Tindakan politik petani.

Di sejumlah Negara, pembangunan pertanian telah dipercepat oleh petani melalui kegiatan kelompok yang melahirkan tekanan politik bagi pemerintah untuk mengambil tindakan dalam bidang pertanian. Memang dalam suatu Negara sering terjadi konflik kepentingan antara petani produsen yang menginginkan imbalan harga tinggi terhadap produk yang dihasilkannya, sementara masyarakat perkotaan menginginkan harga yang lebih murah. Petani mengharapkan harga input dan peralatan pertanian dengan harga yang lebih murah, sementara pengusaha industri dan importirnya mengharapkan

harga yang lebih tinggi. Petani yang berlahan garapan luas ingin lahannya itu tetap dapat mereka miliki, sementara yang lahannya sempit ingin punya lahan lebih luas, apalagi yang tidak memiliki lahan. Hal ini semua berujung pada sistim penguasaan lahan (tenurial system) agar akses untuk menggarap lahan yang lebih terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah melalui kelembagaan kelompok tani, atau partai-partai politik yang ada, kepentingan petani untuk memperoleh imbalan harga produknya yang memadai, penguasaan lahan, perpajakan, dan kepentingan politik untuk meningkatkan kesejahteraannya sudah bisa tersalurkan dan terungkapkan?! Bagaimana pun kegiatan kelompok tani ini perlu didorong dan untuk maksud itu, Mosher (1966) mengungkapkan empat hal:

- a. Membantu pengorganisasiannya dalam hal-hal terkait kepentingan petani, misalnya dalam pembuatan jalan, mengendalikan hama penyakit, mendirikan koperasi pemasaran produk pertanian, dan usaha lainnya.
- b. Bantuan material peralatan atau mesin-mesin sehingga apa yang digarap oleh kelompok tani, kualitasnya baik dan memadai.
- c. Bantuan teknis dan manajerial karena kelompok tani kadang-kadang terkendala dengan pemahaman teknis, manajerial skill, atau kendala infrastruktur yang dihadapinya.
- d. Bantuan finansial, karena dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan sering terkait dengan kendala pendanaan. Ketersediaan uang tunai yang diperlukan sering berada di luar jangkauan kemampuan kelompok tani.

3.5 Koperasi Pertanian

Koperasi sebagai bentuk kerjasama di antara petani, dibahas tersendiri karena ada beberapa kekhususannya.

- 1) Koperasi pertanian adalah lembaga kerjasama yang berorientasi pada kepentingan anggota-anggotanya – petani. Walaupun petani status social maupun status ekonominya berbeda-beda, ada yang punya lahan luas, ada yang lahannya sempit, atau dia hanya menggarap lahan milik orang lain, tetapi

sebagai anggota koperasi pertanian, hak dan kewajibannya sama.

- 2) Petani sebagai produsen hasil-hasil pertanian, berupaya dan berkeinginan memperoleh hasil produksi yang tinggi dan menguntungkan. Hasil yang tinggi bisa diperoleh kalau petani, dengan teknologi yang dikuasainya, bisa dan dapat memperoleh input-input pertanian yang memadai, dengan harga yang relative murah. Apabila hasil yang diperoleh tinggi dan imbalan tingkat harga hasilnya juga baik tentu petani merasa untung. Dengan hasil tinggi dan harganya juga relative tinggi petani mampu memaksimumkan keuntungannya (*maximizing profit*). Itu semua bisa dinikmati kalau koperasi mampu memberikan pelayanannya sebaik mungkin. Koperasi harus mampu melayani agar input-input pertanian yang dibutuhkan petani dapat dilayani dalam jumlah dan waktu yang tepat. Demikian pula setelah petani memperoleh hasil, koperasi pertanian harus mampu menjualkan hasil petani dengan harga yang baik – relative tinggi (dibandingkan dengan harga jual ke tengkulak), tentu membuat petani merasa diuntungkan. Ini semua bisa terjadi karena koperasi pertanian mampu memberikan pelayanan yang maksimum (*maximizing services*) kepada para petani anggota koperasi pertaniannya. Pelayanan koperasi pertanian yang maksimal itu tentu memerlukan biaya, tetapi karena biaya pelayanan yang dikeluarkan dipikul bersama oleh seluruh anggota (*operation at cost*), maka biaya per unit barang-barang yang dilayaninya itu relatif murah.
- 3) Apakah atas jasa pelayanan koperasi pertanian semacam itu koperasi pertanian bisa juga menikmati keuntungan? Tidak! Koperasi adalah lembaga nir laba – zero profit! (Maman, 2022). Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk memenuhi kepentingan anggota dipikul oleh semua anggota – bukan biaya koperasi! Kalau koperasi sebagai suatu lembaga usaha tidak memikul biaya, mengapa kopersi harus memperoleh keuntungan? Jasa kepengurusan koperasi sudah diperhitungkan dari awal dan menjadi beban semua anggota! Kalau atas jerih payah pengurus, mereka merasa berhak menikmati keuntungan, menurut penulis itu bukan koperasi!

Mereka yang berhak menikmati keuntungan, bahkan memaksimumkannya, adalah anggota! Itu semua terjadi atas pelayanan maksimum yang dilakukan koperasi dengan jajaran kepengurusannya. Berkat usaha koperasi semacam inilah semua anggota akan menjadi pelanggannya yang baik dan terpolakan (member patron).

- 4) Adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari semua anggota, tidak menutup kemungkinan bagi koperasi memberikan jasa pelayanan simpan pinjam bagi anggotanya. Ada juga kemungkinan bagi koperasi menerapkan sistim ekonomi syariah, manakala simpan-pinjam anggota-anggotanya dikelola dengan sistim bagi-hasil. Ada juga kemungkinan bagi koperasi memberikan jasa pelayanan konsumsi manakala anggota-anggotanya banyak yang memerlukan keperluan konsumsi dari perkotaan yang sudah berbentuk kemasan, seperti mie, susu, kue-kue, dan berbagai kemasan minuman lainnya. Oleh karena koperasi bisa menghubungi grosir di kota, kemungkinan harga pembelian yang bisa dinikmati anggota jauh lebih murah dibandingkan mereka membeli dari warung penjual eceran. Dengan upaya-upaya koperasi pertanian semacam itu koperasi pertanian itu berubah menjadi koperasi serba usaha yang memenuhi berbagai kepentingan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Currie, J. M. 1981. "The Economic Theory of Agricultural Land Tenure". Cambridge University Press
- Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan – Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan 1987. "Petunjuk Pelaksanaan Bina Kelompok Tani".
- Doll, John P. and Frank Orazem, 1978. "Production Economics – Theory with Application". GRID. Inc. Columbus – Ohio.
- Ellis, Frank. 1988."Peasant Economics" Cambridge University Press. Cambridge.
- Fujimoto, Akimi, 1986." Shre Tenancy and Rice Production: Lessons from Two Village Studies in West Java".in An Economic Study of Rice farming in West Java. Fujimoto, A. and T. Matsuda (ed). Nodai Research Institute, Tokyo Univ. of Agriculture. P. 81 – 99.
- Geertz, Clifford 1976."Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia". Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Hayami, Y. and Kejiro Otsuka, 1993. "The Economics of Contract Choice – An Agrarian Perspective". Clarendon Press Oxford.
- Kano Hiroyoshi, 1977 "Land Tenure System and The Desa Communityin 19th Century Java". Institute of Developing Economics. Tokyo.
- Maman H. K., 2022. Koperasi dan Pasar Persaingan, dalam" Ekonomi Koperasi". Global Eksekutif Teknologi.
- Mosher, A.T. "Getting Agriculture Moving". Agricultural Development Council. Frederick A. Praeger.
- Stevens, Robert D. and Cathy L. Jabara 1988." Agricultural Development Principles – Economic Theory and Empirical Evidence. John Hopkins Univ. Press. Baltimore – London.
- Wiradi G. dan Makali 1984" Penguasaan Tanah dan Kelembagaan",dalam Prospek Pembangunnn Ekonomi Pedesaan Indonesia. Faisal Kasryno (ed). Yayasan Obor Indonesia. Hal. 43 – 104.

BAB 4

ORGANISASI

Oleh Riky Welli Saputra

4.1 Pendahuluan

Kita pasti mengetahui berbagai jenis organisasi yang mempengaruhi setiap tingkat kehidupan kita sehari-hari. Pada umumnya kebanyakan orang menganggap organisasi hanya sebagai sarana atau tempat bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien berdasarkan rasionalitas yang ada. Secara umum, organisasi dibentuk oleh orang-orang yang tujuannya adalah untuk melakukan atau mencapai hal-hal tertentu yang tidak dapat mereka lakukan secara individu. Organisasi pada dasarnya adalah sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil. Ada dua kategori konsep sosiologi organisasi. Yang pertama, disebut organisasi mekanis, didefinisikan sebagai sekelompok orang yang didorong oleh minat yang sama, dan yang kedua, yang disebut organisasi organik, didefinisikan sebagai sekelompok orang yang lebih didorong oleh koneksi internal atau bisa disebut dengan ikatan batin. Dalam praktiknya, masih banyak lagi definisi organisasi yang dibuat dan disesuaikan dengan sifat kegiatan suatu organisasi, sehingga definisi organisasi yang lebih spesifik tidak dapat dihindari. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan ini, tetapi memahami organisasi dalam arti sebenarnya pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai tujuannya. Scharmenson (1985) berpendapat bahwa organisasi ada karena keterbatasan dan kemampuan fisik manusia, di mana orang-orang dapat menjembatani kesenjangan dan bekerja sama dengan saling mengisi kekosongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Organisasi menjadi kajian salah satu ilmu yang dipelajari dan berkembang berdasarkan sistem sosial. Organisasi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, terutama di kehidupan modern. Organisasi membantu kita melakukan hal-hal dan aktivitas yang tidak kita kuasai dan kita laksanakan dengan baik sebagai individu. Oleh karena itu, organisasi dirancang untuk mengatasi keterbatasan yang melekat pada manusia. Aktivitas yang terorganisir menjadi alat utama

manusia untuk mengatasi hambatan yang timbul dari individu-individu. Sekali lagi, kita dapat mengatakan bahwa organisasi mendukung dan membantu masyarakat. Berkontribusi bagi kelangsungan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Organisasi juga merupakan sumber informasi penting untuk berbagai karir di masyarakat. Organisasi adalah bagian dari lingkungan tempat kita bekerja dan bermain. Singkatnya, sebuah organisasi adalah tempat kita melakukan segalanya. Organisasi mempengaruhi kehidupan. Di sisi lain, hal itu juga dapat mempengaruhi organisasi.

4.2 Apa Itu Organisasi ?

Organisasi sulit dipahami. kita melihat organisasi sebagai gedung pencakar langit, tempat kerja komputer, atau karyawan yang ramah, tetapi organisasi secara keseluruhan tidak jelas atau abstrak, dan dapat didistribusikan pada aneka macam lokasi, bahkan di seluruh dunia. Kita tahu organisasi itu ada. Faktanya, memang itu sangat awam sehingga kita menerima begitu saja. Kita lahir di rumah sakit, mempunyai akta kelahiran yang terdaftar pada lembaga pemerintah, dididik di sekolah dan perguruan tinggi, dibesarkan dengan makanan yang dihasilkan berasal pertanian, dirawat sang dokter yang bekerja pada praktik kolektif, meminjam uang dari bank, menghubungi polisi serta pemadam kebakaran Bila terjadi masalah, menggunakan jasa pindahan buat pindah tempat tinggal , dan menerima banyak sekali manfaat dari berbagai instansi pemerintah. Sebagian besar dari kita menghabiskan banyak waktu bekerja pada aneka macam jenis organisasi.

Organisasi disebut organisasi bisnis (organisasi perusahaan) dan organisasi sosial (organisasi publik) dalam hal tujuannya. Organisasi perusahaan berorientasi pada laba serta prinsip kegiatannya merupakan ekonomi rasional. Organisasi sosial bertujuan untuk melayani publik sedangkan prinsip kegiatannya merupakan sosial atau pelayanan publik. contohnya, Organisasi Republik Indonesia (Hasibuan, 2019).

aneka macam organisasi seperti bank, perusahaan pertanian, serta lembaga pemerintah memiliki karakteristik yang sama. Berikut ialah definisi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah organisasi: (1) entitas sosial; (2) diarahkan pada tujuan; (3) dipahami

menjadi sistem aktivitas yang terstruktur dan terkoordinasi secara sadar, serta (4) terkait dengan lingkungan eksternal. Organisasi bukanlah struktur, juga bukan sekumpulan strategi dan metode. Organisasi terdiri dari individu dan hubungan timbal baliknya. Organisasi ada ketika individu bekerja sama satu sama lain untuk menjalankan peran penting yang membantu mereka mencapai tujuan mereka. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat dianggap sebagai instrumen atau sarana yang digunakan oleh pemilik dan kepala untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dapat berubah, tetapi bagian penting dari sebuah organisasi adalah merencanakan individu dan aset untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara keseluruhan. Administrator sengaja mengatur dan memfasilitasi aset hierarkis untuk mencapai tujuan otoritatif. Meskipun pekerjaan dapat dikoordinasikan ke dalam divisi atau kelompok latihan yang berbeda, sebagian besar atau organisasi modern bertujuan untuk koordinasi aktivitas kerja yang lebih horizontal, sering menggunakan kelompok individu dari berbagai bidang praktis. Karena kebutuhan mungkin muncul untuk menjawab lebih cepat perubahan iklim luar, batas antara kantor dan organisasi menjadi lebih mudah beradaptasi dan lebih luas. Organisasi tidak akan ada tanpa komunikasi dengan klien, penyedia, pesaing, dan komponen lain dari iklim luar. Saat ini, beberapa perusahaan bekerja sama dengan pesaing mereka dan berbagi informasi dan teknologi untuk saling menguntungkan.

4.3 Pentingnya Organisasi

Mungkin sulit buat mempercayai ini, tetapi organisasi seperti yang mungkin kita sadari relatif terlambat dalam rangkaian pengalaman umat manusia. Memang, bahkan pada akhir abad kesembilan belas ada beberapa organisasi dari aneka macam ukuran atau signifikansi. tidak banyak serikat pekerja, afiliasi pertukaran, perusahaan besar, organisasi non-profit, atau kantor pemerintah. Perubahan apa yang Anda lihat semenjak waktu itu? Perkembangan organisasi lingkup besar mengubah masyarakat secara holistik. Bahkan, usaha mutakhir mungkin adalah perkembangan primer pada 100 tahun terakhir.

Organisasi mengelilingi kita dan mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai cara. Namun, apa komitmen organisasi? Untuk alasan

apa itu signifikan? Gambar 4.1 menunjukkan tujuh motivasi di balik mengapa organisasi cukup berarti bagi Anda dan masyarakat. Pertama-tama, ingatlah bahwa organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Organisasi mengumpulkan sumber daya untuk mencapai tujuan eksplisit.



Gambar 4.1 : Pentingnya Organisasi

Source: Cengage Learning 2013

Sebuah contoh Northrup Grumman Newport News (sebelumnya Newport News Shipbuilding), yang membuat kapal induk berbahan bakar Nuklir kelas Nimitz yang mengangkut kapal perang. Membangun kapal induk adalah pekerjaan yang sangat rumit yang membutuhkan 47.000 ton baja las yang akurat, lebih dari 1.000.000 bagian yang berbeda, 900 mil kawat dan sambungan, dan lebih dari tujuh tahun kerja keras oleh 17.800 pekerja. Bagaimana fungsi tersebut dapat dikelola tanpa organisasi dan pengorganisasian sumber daya yang berbeda ini?

Organisasi juga menghasilkan tenaga kerja dan produk yang diminta oleh klien mereka dengan harga yang kompetitif. Organisasi

mencari cara imajinatif untuk menciptakan dan menyesuaikan tenaga kerja dan produk yang mereka butuhkan dengan lebih produktif. Ada dua cara berbeda: memanfaatkan e-bisnis dan inovasi fabrikasi komputerisasi. Manajemen Sandberg Furniture yang berbasis di Vernon, California telah menggunakan inovasi canggih untuk membantu bisnis yang dimiliki keluarga berusia 133 tahun ini mengungguli kontes persaingan di seluruh dunia. Dihadapkan dengan persaingan yang ketat, peraturan lingkungan California yang ketat, dan tantangan lainnya, satu-satunya cara Sandberg Furniture dapat bertahan adalah berinvestasi dalam teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi. Mendesain ulang struktur organisasi serta praktik manajemen juga bisa membantu menaikkan efisiensi. Organisasi menciptakan dorongan inovasi daripada mengandalkan produk standar dan pendekatan usang untuk manajemen serta desain organisasi.

Organisasi beradaptasi dan berdampak pada lingkungan yang berubah dengan cepat. Pikirkan Facebook, yang terus beradaptasi dan berkembang seiring dengan berkembangnya Internet dan lingkungan media sosial. Pada saat itu perusahaan memperkenalkan fitur panggilan video gratis kepada 750.000 anggotanya di seluruh dunia. Mark Zuckerberg pendiri dan CEO menginginkan manajer yang tidak takut merusak sesuatu untuk membuatnya lebih baik. Tim manajemen Facebook mendorong budaya tak kenal takut, membantu perusahaan memenangkan posisi teratas pada Fast Company 2010 dari 50 perusahaan paling inovatif di dunia (turun ke Nomor 3 pada 2011, di belakang Apple dan Twitter). Bahkan selama masa ekonomi yang suram, Facebook meningkatkan tim tekniknya, berinvestasi dalam ide-ide baru, dan mendorong orang untuk mengambil risiko demi masa depan. banyak organisasi mempunyai seluruh departemen yang ditugaskan untuk memantau lingkungan eksternal dan menemukan cara untuk menyesuaikan atau mensugesti lingkungan itu.

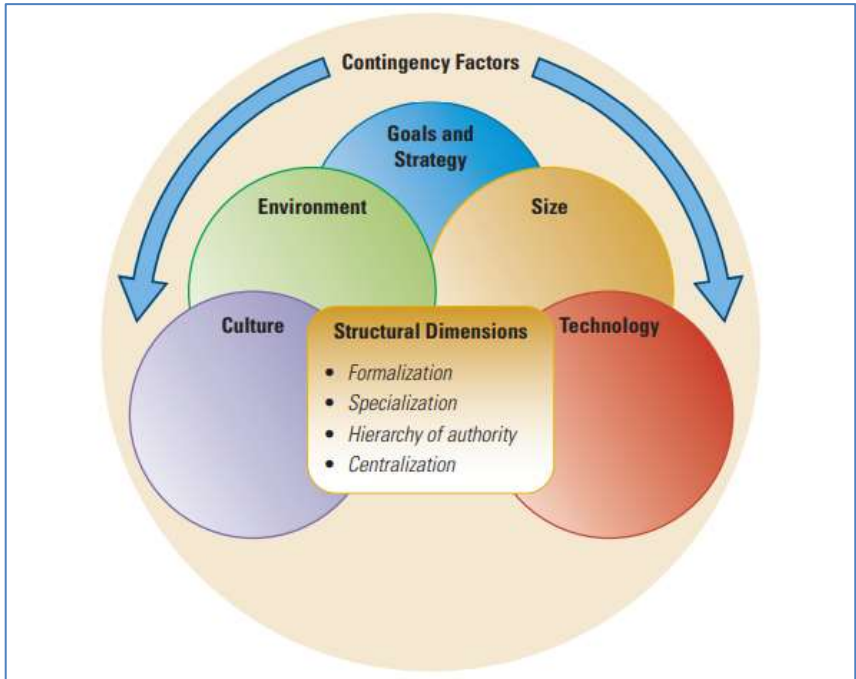
Melalui seluruh aktivitas ini, perusahaan menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan, serta karyawannya. Manajer menganalisis bagian mana dari operasi yang menghasilkan nilai serta bagian mana yang tidak. Sebuah usaha hanya mampu menguntungkan jika nilai yang diciptakannya melebihi biaya sumber dayanya. misalnya, Vizio Inc., yang sepertinya timbul entah dari mana sebagai penjual TV layar datar HD teratas di Amerika Serikat, memanfaatkan teknologi LCD yang

terdapat serta bermitra menggunakan penghasil kontrak alih-alih membuat TV rumahan. dengan menjaga biaya tetap rendah, perusahaan yang berbasis di California ini bisa menjual HDTV panel datar menggunakan harga lebih kurang setengah berasal harga yang dijual sang Produsen elektro besar. Akhirnya, organisasi dapat mengatasi tantangan tenaga kerja yang majemuk saat ini dan meningkatnya kekhawatiran tentang etika dan keberlanjutan, menemukan cara yang efektif untuk memotivasi karyawan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

4.4 Dimensi Desain Organisasi

Organisasi membuat kehidupan kita, serta manajer yang berpengetahuan luas bisa membentuknya. Langkah pertama dalam memahami sebuah organisasi adalah dengan melihat karakteristik yang menggambarkan karakteristik desain berasal organisasi tertentu. Ciri-ciri ini mendeskripsikan sebuah organisasi dengan cara yang sama seperti kepribadian dan ciri-ciri fisik mendeskripsikan seseorang.

Gambar 4.2 mengilustrasikan dua karakteristik keterkaitan organisasi: aspek struktural dan kontinjensi. Dimensi struktural memberikan label yang menggambarkan karakteristik internal organisasi. Diagram ini menciptakan dasar untuk mengukur dan membandingkan organisasi. Faktor kontingensi mencakup faktor yang lebih besar yang mempengaruhi aspek struktural seperti ukuran, teknologi, lingkungan, budaya, dan tujuan organisasi. Kontingensi mewakili sikap organisasi yang mempengaruhi dan membentuk aspek struktural. Faktor yang tidak disengaja dapat membingungkan karena mewakili organisasi dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai rangkaian elemen yang saling berpotongan yang membentuk struktur organisasi dan proses kerja, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Memahami dan mengevaluasi sebuah organisasi memerlukan melihat aspek struktural dan kontinjensinya. Fitur desain organisasi ini berinteraksi dan dapat dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang diuraikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 : Dimensi Struktural yang Berinteraksi dari Desain dan Faktor Kontinjensi

Source: Cengage Learning 2013

4.5 Dimensi Struktural Organisasi

Dimensi struktur organisasi utama meliputi formalisasi (*formalization*), spesialisasi (*specialization*), hirarki wewenang (*hierarchy of authority*), dan sentralisasi (*centralization*).

1. Formalisasi (*formalization*) berkaitan dengan jumlah dokumentasi tertulis dalam organisasi. Dokumentasi meliputi prosedur, uraian tugas, peraturan, dan manual kebijakan. Dokumen tertulis ini menggambarkan perilaku dan aktivitas. Formalisasi sering diukur dengan hanya menghitung jumlah halaman dokumentasi dalam organisasi. Universitas-universitas besar, misalnya, cenderung tinggi pada formalisasi karena mereka memiliki beberapa volume aturan tertulis untuk hal-hal seperti pendaftaran, penurunan dan penambahan kelas, asosiasi mahasiswa, tata kelola asrama, dan bantuan keuangan. Sebaliknya, bisnis kecil milik keluarga

mungkin hampir tidak memiliki aturan tertulis dan akan dianggap informal.

2. Spesialisasi (*specialization*) adalah sejauh mana tugas-tugas organisasi dibagi lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Jika spesialisasi luas, setiap karyawan hanya melakukan tugas yang terbatas. Jika spesialisasi rendah, karyawan melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan mereka. Spesialisasi kadang-kadang disebut sebagai pembagian kerja.
3. Hirarki Wewenang (*hierarchy of authority*) menjelaskan siapa melapor kepada siapa dan rentang kendali untuk setiap manajer. Hirarki digambarkan oleh garis vertikal pada bagan organisasi, Hirarki terkait dengan rentang kendali (jumlah karyawan yang melapor ke supervisor). Ketika rentang kendali sempit, hierarki cenderung tinggi. Ketika rentang kendali lebar, hierarki otoritas akan lebih pendek.
4. Sentralisasi (*centralization*) mengacu di tingkat hierarki yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. ketika pengambilan keputusan disimpan pada taraf atas, itu sentralisasi. ketika keputusan didelegasikan ke taraf organisasi yang lebih rendah, itu didesentralisasi. model keputusan organisasi yang mungkin tersentralisasi atau terdesentralisasi meliputi pembelian alat-alat, penetapan tujuan, pemilihan pemasok, penetapan harga, perekrutan karyawan, dan penentuan wilayah pemasaran.

Struktur dan bagan organisasi (*organization chart*) dikemukakan secara singkat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 : Struktur dan Bagan Organisasi

Struktur Organisasi	Bagan Organisasi
1. Organisasi Lini	Berbentuk segitiga vertikal/horizontal
2. Organisasi Lini dan Staf	Berbentuk kerucut vertikal/horizontal
3. Organisasi Fungsional	Berbentuk setengah lingkaran/lingkaran
4. Organisasi Lini, Staf, dan Fungsional	Berbentuk oval/lonjong telur
5. Organisasi Komite	

Source: Malayu S.P. Haubuan 2019

Hasibuan (2019) mengemukakan struktur dan bagan organisasi memberikan manfaat dan informasi penting tentang hal-hal berikut:

1. Pembagian kerja berarti bahwa setiap kotak bagan mewakili tanggung jawab individu atau subunit bagian tertentu dari beban kerja organisasi.
2. Informasi atasan dan bawahan artinya bagan organisasi menunjukkan rantai komando atau siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah.
3. Sifat pekerjaan yang dilakukan berarti bahwa deskripsi kotak menunjukkan area yang berbeda dari tugas atau tanggung jawab pekerjaan organisasi.
4. Pengelompokan bagian-bagian pekerjaan berarti bahwa keseluruhan diagram menjadi dasar untuk perincian kegiatan organisasi (area, produksi, fungsi bisnis, dll.).
5. Tingkat manajer berarti bahwa bagan menunjukkan seluruh hierarki manajemen, bukan hanya manajer dan bawahan individu. Orang-orang yang melapor kepada orang yang sama akan memiliki tingkat kepemimpinan yang sama di mana pun mereka muncul di bagan.
6. Kepemimpinan organisasi berarti bahwa bagan organisasi menunjukkan sistem kepemimpinan organisasi, apakah itu pemimpin individu (segitiga) atau pemimpin kelompok (kerucut).

4.6 Faktor Kontingensi

Memahami dimensi struktural saja tidak membantu kita memahami atau merancang organisasi dengan tepat. Penting juga untuk melihat faktor kontingensi, termasuk ukuran, teknologi organisasi, lingkungan eksternal, tujuan dan strategi, dan budaya organisasi.

1. Ukuran (*size*) dapat diukur untuk organisasi secara keseluruhan atau untuk komponen tertentu, seperti pabrik atau divisi. Karena organisasi adalah sistem sosial, ukuran biasanya diukur dengan jumlah karyawan. Ukuran lain seperti total penjualan atau total aset juga mencerminkan besarnya, tetapi tidak menunjukkan ukuran bagian manusia dari sistem.

2. Teknologi Organisasi (*organizational technology*) mengacu pada alat, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Ini menyangkut bagaimana organisasi benar-benar menghasilkan produk dan layanan yang disediakan untuk pelanggan dan mencakup hal-hal seperti manufaktur fleksibel, sistem informasi canggih, dan Internet. Jalur perakitan mobil, ruang kelas perguruan tinggi, dan sistem pengiriman paket semalam adalah teknologi, meskipun mereka berbeda satu sama lain.
3. Lingkungan (*environment*) mencakup seluruh elemen di luar batasan organisasi. Elemen kunci tercantum industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, serta komunitas keuangan. Elemen lingkungan yang sangat mempengaruhi organisasi kerap kali merupakan organisasi lain.
4. Tujuan dan strategi organisasi (*organization's goals and strategy*) memastikan tujuan serta tata cara kompetitif yang membedakan organisasi dari yang lain. Tujuan sering ditulis selaku statment permanen dari hasrat industri. Strategi merupakan rencana aksi yang menggambarkan alokasi sumber daya serta kegiatan untuk menanggulangi lingkungan serta menggapai tujuan organisasi. Sasaran serta strategi memastikan ruang lingkup pembedahan bisnis serta ikatan dengan karyawan, pelanggan, dan pesaing.
5. Budaya organisasi (*organization's culture*) Seperangkat nilai, kepercayaan, uraian, serta norma kunci yang dimiliki bersama oleh karyawan. Nilai serta norma yang mendasari ini, yang bisa jadi terpaut dengan sikap etis, komitmen terhadap karyawan, efisiensi, ataupun layanan pelanggan, membagikan perekat yang mengikat anggota organisasi bersama. Budaya tidak tertulis, namun bisa diamati dalam ceritanya, slogan, upacara, gaun serta desain kantor.

Empat dimensi struktural serta lima aspek kontingensi yang dibahas disini saling tergantung. Aspek kontingensi tertentu akan mempengaruhi tingkatan spesialisasi, formalisasi, serta sebagainya yang cocok untuk organisasi. Misalnya, dimensi organisasi yang besar, teknologi teratur, serta lingkungan yang stabil, seluruhnya cenderung

menghasilkan organisasi yang mempunyai formalisasi, spesialisasi, serta sentralisasi yang lebih besar.

4.7 Hasil Kinerja Dan Efektivitas

Inti dari menguasai aspek struktural serta kontinjensi merupakan merancang organisasi untuk menggapai kinerja serta daya guna yang besar. Manajer mengoordinasikan bermacam aspek organisasi untuk secara sangat efektif serta efisien mengganti input jadi output serta membagikan nilai. Efisiensi mengacu pada jumlah sumber daya yang digunakan untuk menggapai tujuan organisasi. Ini didasarkan pada jumlah bahan baku, uang, serta personel yang diperlukan untuk melaksanakan layanan tertentu. Daya guna merupakan sebutan yang lebih luas yang menggambarkan sepanjang mana sesuatu organisasi menggapai tujuannya.

Supaya suatu organisasi jadi efektif, ia wajib mempunyai tujuan yang jelas serta terencana dan strategi yang pas untuk mencapainya. Banyak bisnis yang mengadopsi teknologi baru untuk tingkatan efisiensi serta efektivitas. Gunakan teknologi informasi untuk mengurangi dokumen dan merampingkan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan tiga pekerja kantor yang lebih sedikit untuk merawat lebih banyak pasien. Sistem baru juga membuatnya lebih efektif. Staf dapat menemukan informasi lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan, menciptakan mutu layanan yang lebih baik serta layanan pelanggan yang lebih baik.

Menggapai daya guna tidak senantiasa gampang, sebab orang yang berbeda mengharapkan perihal yang berbeda dari suatu organisasi. Untuk pelanggan, ini semua tentang menyediakan produk serta layanan bermutu dengan harga yang wajar, serta untuk karyawan, ini semua tentang pendapatan yang wajar, kondisi kerja yang baik, serta kepuasan kerja. Manajer dengan hati-hati memikirkan kebutuhan serta kepentingan bermacam pemangku kepentingan kala menetapkan tujuan serta mencari efektivitas. Ini diucap pendekatan pemangku kepentingan serta memandang bermacam pemangku kepentingan dalam organisasi serta apa yang mereka mau dari organisasi serta mengintegrasikan bermacam-macam kegiatan organisasi. Pemangku kepentingan merupakan kelompok di dalam serta di luar organisasi yang berkepentingan dengan kinerja organisasi.

Kepuasan tiap kelompok bisa dievaluasi sebagai indikator kinerja serta efektivitas organisasi.



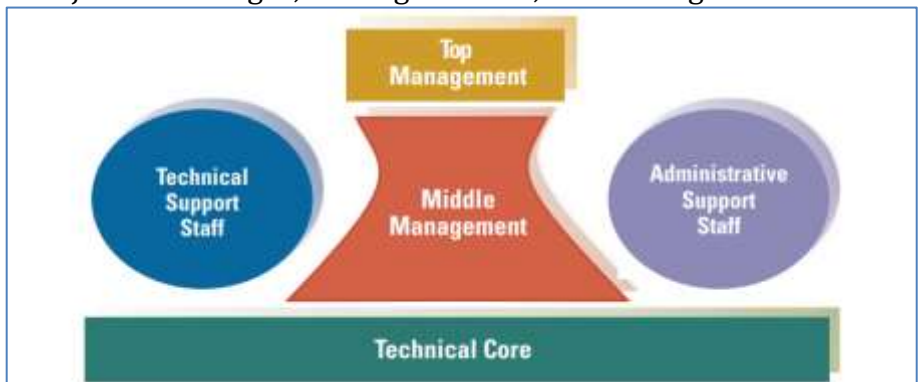
Gambar 4.3 : Kelompok Pemangku Kepentingan Utama dan Apa yang Mereka Harapkan

Source: Cengage Learning 2013

Gambar 4.3 menunjukkan berbagai pemangku kepentingan dan harapan mereka terhadap organisasi. Dengan kepentingan pemangku kepentingan yang sering berkonflik, organisasi sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok secara bersamaan. Sebuah organisasi mungkin memiliki kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi sebuah organisasi mungkin memiliki masalah dengan kreditur atau hubungan yang buruk dengan pemasok. Tantangan menjalankan organisasi sebesar ini adalah juga menciptakan ketegangan dalam hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Ini dibuktikan dengan tuntutan hukum baru-baru ini yang menuduh seksisme dan keluhan tentang upah rendah dan tunjangan yang buruk. Di semua organisasi, manajer harus mengevaluasi perhatian pemangku kepentingan dan menetapkan tujuan yang dapat mencapai setidaknya kepuasan minimal bagi kelompok pemangku kepentingan utama.

4.8 Sebuah Contoh konfigurasi Organisasi

Wawasan kunci dari peneliti desain organisasi adalah bagaimana organisasi terstruktur: bagian-bagian yang membentuk sebuah organisasi dan bagaimana berbagai bagian cocok bersama. Desain atau komposisi organisasi mencerminkan faktor-faktor yang tidak terduga di sepanjang pola yang dapat diidentifikasi. Salah satu kerangka kerja yang diusulkan oleh Henry Mintzberg menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki lima bagian. Bagian ini, ditunjukkan pada Gambar 4.4, termasuk Inti Teknis, Manajemen Puncak, Manajemen Menengah, Dukungan Teknis, dan Dukungan Administratif.



Gambar 4.4 : Lima Bagian Dasar Organisasi

Source: Cengage Learning 2013

Inti Teknis. Inti teknis mengkombinasikan individu yang menuntaskan pekerjaan dasar organisasi. Bagian ini betul-betul menciptakan item serta administrasi organisasi. Di sinilah pergantian utama dari kontribusi ke hasil terjadi. Inti teknis merupakan divisi manufaktur perusahaan manufaktur, instruktur akademi tinggi serta wali kelas, serta latihan klinis klinik.

Dukungan teknis. Keahlian support teknis menolong organisasi menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan mereka saat ini. Staf support teknis semacam insinyur, periset, serta profesional TI menyaring lingkungan untuk permasalahan, kesempatan, serta pertumbuhan teknis. Support Teknis bertanggung jawab guna membawa inovasi ke inti teknis dan menolong organisasi berubah serta membiasakan diri.

Dukungan administratif. Guna pendukung administrasi bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan serta pemeliharaan organisasi, tercantum komponen fisik serta manusia. Ini mencakup aktivitas sumber daya manusia semacam perekrutan serta seleksi, pengaturan kompensasi serta tunjangan, pelatihan serta pengembangan karyawan, serta aktivitas pemeliharaan semacam pembersihan sarana serta pemeliharaan dan perbaikan mesin.

Manajemen. Manajemen merupakan fungsi yang berbeda, bertanggung jawab untuk memusatkan serta mengkoordinasikan bagian lain dari organisasi. Manajemen puncak membagikan arahan, perencanaan, strategi, tujuan, serta kebijakan untuk segala organisasi ataupun divisi utama. Manajemen menengah bertanggung jawab atas implementasi serta koordinasi di tingkatan departemen. Dalam organisasi tradisional, manajer menengah bertanggung jawab untuk menengahi antara manajemen puncak serta inti teknis, semacam mempraktikkan ketentuan serta meneruskan informasi ke atas dan ke dasar hierarki.

Ukuran dan interaksi kelima bagian ini dapat sangat bervariasi antar organisasi. Satu organisasi mungkin memiliki staf pendukung teknis yang besar dan staf pendukung administratif yang minimal, sedangkan sebaliknya mungkin berlaku untuk perusahaan lain. Dalam organisasi dunia nyata, kelima bagian tersebut kerap kali silih terpaut serta melayani banyak fungsi. Misalnya, manajer mengoordinasikan serta memusatkan bagian organisasi, namun bisa jadi pula ikut serta dalam dukungan administratif serta teknis. Intinya adalah kalau menguasai 5 bagian ini membagikan tata cara untuk berpikir tentang bermacam elemen manusia yang membentuk suatu organisasi.

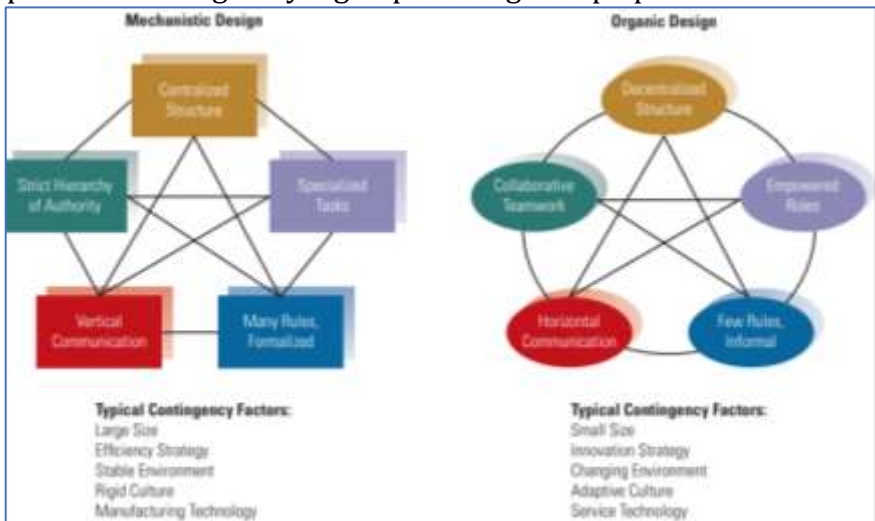
4.9 Desain Organisasi Organik Dan Organisasi Mekanistik

Organisasi juga bisa dikategorikan selama kontinum mulai dari desain mekanistik sampai desain organik. Tom Burns serta GM Stalker awal kali memakai sebutan organik serta mekanistik buat menggambarkan 2 ekstrem desain organisasi sehabis mengamati industri industri di Inggris.

Secara universal, Organisasi mekanistik berarti kalau organisasi dicirikan oleh ketentuan standar, prosedur, serta hirarki wewenang

yang jelas semacam mesin. Organisasi sangat resmi serta pula terpusat, dengan sebagian besar keputusan dibuat di atas. Organisasi organik berarti kalau organisasi jauh lebih longgar, mengalir leluasa, serta adaptif. Ketentuan serta regulasi kerap kali tidak tertulis atau, jika ditulis, diterapkan secara fleksibel. Orang bisa jadi harus menciptakan jalur mereka sendiri lewat sistem guna mencari tahu apa yang wajib dilakukan. Hirarki wewenang lebih longgar serta tidak jelas otoritas pengambilan keputusan didesentralisasi.

Berbagai aspek kontingensi akan mempengaruhi apakah suatu organisasi lebih efisien dengan desain utama mekanistik ataupun organik. Gambar 4.4 merangkum perbandingan dalam desain organik serta mekanistik bersumber pada 5 elemen: struktur, tugas, formalisasi, komunikasi, serta hierarki. Pada ilustrasi gambar juga mencantumkan aspek khas kontingensi yang terpaut dengan tiap tipe desain.



Gambar 4.5 : Desain Organisasi Organik dan Organisasi Mekanistik
Source: Cengage Learning 2013

- Struktur Sentralisasi vs Desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi berkaitan dengan tingkat hierarki di mana keputusan dibuat. Dalam desain mekanistik, strukturnya terpusat, sebaliknya desain organik memakai pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Sentralisasi berarti kalau otoritas keputusan terletak di dekat puncak hierarki

organisasi. Pengetahuan serta pengendalian kegiatan dipusatkan di bagian atas organisasi, serta karyawan diharapkan melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan desentralisasi, otoritas pengambilan keputusan didorong ke tingkatan organisasi yang lebih rendah. Dalam organisasi yang sangat organik, pengetahuan serta pengendalian kegiatan ditempatkan pada karyawan daripada dengan supervisor ataupun eksekutif puncak. Orang didorong untuk menanggulangi permasalahan dengan bekerja satu sama lain serta dengan pelanggan, menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat keputusan.

- Tugas Khusus vs Peran yang diberdayakan. merupakan bagian pekerjaan yang didefinisikan secara kecil yang ditugaskan kepada seorang dengan desain mekanistik, tugas dipecah jadi bagian- bagian spesial yang terpisah, semacam dalam mesin, dengan tiap karyawan melaksanakan kegiatan cocok dengan deskripsi pekerjaan tertentu. Kedudukan dalam sistem sosial yang dinamis. Kedudukan mempunyai keleluasaan serta tanggung jawab, yang membolehkan orang tersebut memakai kebijaksanaan serta kemampuannya guna menggapai sesuatu hasil ataupun penuhi tujuan. Dalam suatu organisasi dengan desain organik, karyawan memainkan kedudukan dalam regu ataupun departemen serta kedudukan bisa terus didefinisikan ulang ataupun disesuaikan.
- Formal vs Informal Sistem. Dengan desain yang mekanistik, terdapat banyak ketentuan, regulasi, serta prosedur standar. Sistem resmi ada buat mengelola data, memandu komunikasi, serta mengetahui penyimpangan dari standar serta tujuan yang sudah diresmikan. Dengan desain organik, di sisi lain, terdapat sebagian ketentuan ataupun sistem kontrol resmi. Komunikasi serta berbagi data bertabiat informal.
- Komunikasi Vertikal vs Horisontal. Organisasi mekanistik menekankan komunikasi vertikal ke atas serta ke dasar hierarki. Manajer puncak mengantarkan data ke dasar kepada karyawan tentang tujuan serta strategi, instruksi kerja, prosedur, serta sebagainya, serta pada gilirannya memohon karyawan membagikan data ke atas hierarki menimpa

permasalahan, laporan kinerja, data keuangan, anjuran serta ilham, serta sebagainya. Dalam organisasi organik, terdapat penekanan yang lebih besar pada komunikasi horizontal, dengan data yang mengalir ke seluruh arah di dalam serta di segala kementerian serta tingkatan hierarki. Berbagi data secara luas membolehkan seluruh karyawan mempunyai data lengkap tentang industri sehingga mereka bisa berperan kilat. Tidak hanya itu, organisasi organik memelihara jalan komunikasi yang terbuka dengan pelanggan, pemasok, serta apalagi pesaing untuk meningkatkan keahlian belajar.

- Hirarki Kewenangan vs Kerja Sama Tim Kolaboratif. Dalam organisasi dengan desain mekanistik, terdapat kepatuhan erat pada hierarki vertikal serta rantai komando resmi. Kegiatan kerja umumnya diatur oleh yang universal Guna Organisasi dari dasar ke atas organisasi serta terdapat sedikit kerja sama antar kementerian fungsional. Segala organisasi dikendalikan lewat hierarki vertikal. Desain organik, di sisi lain, menekankan kerja regu kolaboratif daripada hierarki. Struktur terbuat di dekat alur kerja ataupun proses horizontal daripada guna kementerian, dengan orang-orang yang bekerja melintasi batasan kementerian serta organisasi buat membongkar permasalahan. Hirarki vertikal secara dramatis diratakan, dengan bisa jadi cuma sebagian eksekutif senior dalam guna pendukung tradisional semacam keuangan ataupun sumber energi manusia. Regu mandiri merupakan unit kerja mendasar dalam organisasi yang sangat organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu SP. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Cetakan Kedua Puluh Tiga. Jakarta : Bumi Aksara
- Howard Aldrich. 1979 Organizations and Environments. Engle- wood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Richad L. Daft. 2013. Organizational Theory & Design. Eleventh Edition. South-Western: Cengage Learning.
- Royston Greenwood and Danny Miller. 2010 “Tackling Design Anew: Getting Back to the Heart of Organizational Theory,” Academy of Management Perspectives.
- Sari, Elina. 2006. Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta Timur: Jayabaya University Press.
- Sugandi, Y. S. 2011. Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winardi, J. 2017. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

BAB 5

STRATIFIKASI SOSIAL DAN KAITANNYA DENGAN DUNIA PERTANIAN

Oleh Roosganda Elizabeth

5.1 Konsep Stratifikasi Sosial

Bermula dari manusia mengenal kehidupan, saat itulah munculnya stratifikasi. Aristoteles (seorang ahli filosof Yunani) telah mengungkapkan fenomena pada masyarakat di zaman kuno. Menurutnyanya, bahwa pada setiap negara selalu ditemui tiga unsur masyarakat, yaitu golongan masyarakat yang sangat kaya, golongan masyarakat di tengah-tengah, dan golongan mereka yang melarat. Apa yang diungkapkan Aristoteles ini, membuktikan bahwa di zaman kuno tersebut orang telah mengakui adanya lapisan-lapisan atau strata masyarakat, yang tersusun berbentuk segitiga piramida bertingkat. Sebagaimana bangun piramida bertingkat, maka setiap lapisan sosial tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya.

Sampai saat ini, disadari atau tidak, bahwa di setiap kelompok masyarakat, pasti terdapat perbedaan antara satu kelompok individu dengan kelompok lainnya. Meskipun sering muncul istilah “kita adalah sama”, namun dalam kenyataannya selalu tergambar perbedaan. Kelompok-kelompok dalam masyarakat ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Perbedaan antar lapisan sosial ini dapat terjadi berdasarkan aspek pendidikan, keturunan, ekonomi, suku, agama dan politik.

Memahami tentang konsep stratifikasi sosial dalam masyarakat, terkadang merupakan sesuatu yang gampang-gampang susah. Untuk memudahkan memahami pengertian tentang konsep stratifikasi sosial, Dwinarwoko dan Suyanto (2010), menjelaskan bahwa dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya, sadar atau tidak pada saat kita mulai

membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya ke dalam suatu golongan tertentu pada saat itu pula kita sudah dapat membagi masyarakat ke dalam golongan lapisan-lapisan sosial tertentu.

Strata atau lapisan dalam masyarakat, muncul secara alami dalam proses pertumbuhan masyarakat. Perbedaan yang muncul dapat menjadi sistem tersendiri dalam menciptakan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem strata ini juga digunakan dalam pembagian wewenang dan kekuasaan dalam organisasi formal dan non formal. Dengan demikian, stratifikasi sosial merupakan suatu gejala umum yang kita temukan dalam masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks.

Adapun stratifikasi sosial masyarakat desa, sangat berbeda dengan stratifikasi masyarakat kota. Perbedaan ini berhubungan dengan kondisi geografis wilayah. Desa kita kenal sebagai daerah pertanian (*agraris*), sehingga kegiatan masyarakatnya dominan sebagai petani. Karakteristik masyarakat desa masih tradisional dan cenderung homogen. Masyarakat desa masih memegang kuat sistem kekerabatan, dan rasa gotong royong masih kental. Stratifikasi sosial di masyarakat desa terbentuk berdasarkan kepemilikan lahan, agama dan keturunan. Lahan di perdesaan dipandang sebagai penentu status sosial seseorang. Sering kita dengar istilah “tuan tanah”, artinya seseorang yang memiliki tanah luas dan digarap oleh banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan. Status “Haji” juga sebagai pembeda stratifikasi sosial di masyarakat desa. Seseorang yang sudah menyandang “Haji” (sudah pernah menunaikan ibadah haji), dipandang memiliki strata yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sementara itu, masyarakat kota memiliki karakteristik individual dan berorientasi industrialisasi. Masyarakat kota sangat heterogen, sehingga rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan sangat tipis. Stratifikasi sosial di masyarakat kota biasanya terbentuk berdasarkan faktor ekonomi. Kelompok masyarakat kota yang memiliki banyak kekayaan dianggap menempati strata yang tinggi.

5.2 Pengertian Stratafikasi Sosial dan Kelas Sosial

Sebelum kita membahas tentang pengertian stratafikasi sosial, ada baiknya kita jelaskan dahulu perbedaan antara stratafikasi sosial dengan kelas sosial, agar tidak memunculkan pemahaman yang keliru. Kedua istilah ini sering disamakan maknanya, namun sesungguhnya mengandung konsep dan arti yang berbeda. Penjelasan perbedaan antara stratafikasi sosial dan kelas sosial ini dapat lebih kita pahami dengan menyimak pernyataan Horton dan Hunt (1984), sebagai berikut:

“Terbentuknya stratifikasi dan kelas sosial pada hakekatnya tidak selalu berhubungan dengan uang. Stratifikasi sosial itu sendiri diartikan sebagai strata atau pelapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan status sosial dalam masyarakat. Hal yang lebih penting dari pada itu, adalah di mana mereka memiliki sikap, nilai-nilai dan gaya hidup yang sama, semakin rendah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan kedudukan sosialnya”.

5.2.1 Pengertian Stratafikasi Sosial

Istilah stratafikasi sosial dalam ilmu sosiologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *social stratification*. Kata *stratification* diambil dari bahasa latin, yaitu *stratum*. *Stratum* dalam bahasa latin berarti strata atau lapisan. Secara umum stratafikasi sosial merujuk pada pengelompokan orang ke dalam tingkatan atau strata dalam hirarki (bertingkat) secara vertikal. Bicara stratafikasi artinya membahas terkait dengan posisi atau kedudukan antar orang/kelompok orang dalam kondisi yang tidak setingkat/sederajat. Munculnya stratafikasi sosial tersebut karena adanya perbedaan antara individu/kelompok individu. Perbedaan ini biasanya memiliki simbol-simbol tertentu yang dipandang berharga, baik secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, pendidikan, keturunan, dan dimensi-dimensi lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman, perhatikan contoh stratafikasi sosial yang ada di desa A berikut ini:

“Dalam suatu kelompok masyarakat desa, biasanya dikenal dengan masyarakat lapisan sosial atas dan lapisan sosial bawah. Masyarakat desa yang tergolong lapisan sosial atas dengan kriteria memiliki lahan garapan milik sendiri yang luas (lebih dari 1 hektar). Lahan garapan yang luas mengindikasikan pendapatan tinggi, sehingga

memiliki rumah dan barang-barang lainnya jauh lebih layak. Masyarakat yang tergolong lapisan sosial rendah, dengan kriteria luas lahan garapan sempit (kurang dari 0,25 hektar), bahkan tidak punya lahan, melainkan hanya sebagai penggarap. Sempitnya lahan garapan mengindikasikan kecilnya pendapatan, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak.

Secara spesifik, pengertian stratafikasi sosial telah banyak dikemukakan para ahli. Berikut ini dijelaskan pengertian stratafikasi sosial yang dari Wulandari (2009).

1. Soerjono Soekanto

Stratifikasi sosial yaitu suatu lapisan masyarakat yang di dalamnya ditemui kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial tersebut memiliki sesuatu yang dihargai, bisa berupa kekayaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan keluarga terhormat. Masyarakat akan menempatkan seseorang pada strata yang lebih tinggi jika ia memiliki banyak harta, berilmu tinggi, ataupun berasal dari keturunan bangsawan. Tidak harus semua kriteria tersebut melekat pada seseorang, bisa saja salah satunya. Misalnya seseorang yang memiliki banyak kekayaan, namun tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, maka ia pun dapat menempati strata yang lebih tinggi dalam masyarakat.

2. Pritin A. Sorikin

Stratifikasi sosial ialah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis). Wujudannya berupa kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Adanya kelas-kelas dalam masyarakat ini mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Kondisi ini mempengaruhi terhadap nilai-nilai sosial di antara anggota masyarakat.

3. Karl Marx

Stratifikasi sosial ialah perbedaan kelompok masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang ditentukan oleh adanya **relasi** mereka terhadap **alat-alat produksi**. Relasi ini terjadi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas atau dikenal juga dengan "*borjois*" yaitu kelompok masyarakat yang memiliki modal kekayaan dan yang mengontrol sumber-sumber kekayaan seperti tanah, bahan baku, mesin-mesin produksi, dan tenaga kerja. Sedangkan kelas bawah atau dikenal dengan istilah

“proletar” yaitu kelompok masyarakat yang tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga mereka sendiri untuk bekerja. Masyarakat kelas *“proletar”* ini hanya berperan sebagai buruh. Karl Marx melihat bahwa kondisi seperti ini sebagai medan konflik, dimana terjadi perlawanan oleh masyarakat kelas bawah terhadap kelas atas. Menurut Karl Marx, dalam proses produksi terjadi sebuah determinism ekonomi masyarakat kapitalisme. Keadaan ini memicu terjadinya penindasan terhadap kaum buruh yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sehingga oleh Karl Marx disebut perbuatan yang sangat tidak bermoral.

4. Max Weber

Weber banyak menerangkan mengenai kelas status dan partai. Ia menyampaikan analisa singkat yang mendalam terkait lapisan sosial. Hal penting yang disampaikannya berpusat pada perbedaan yang mengenai kelas dan status. Perlu dicermati bahwa Weber tidak menganggap kelas sebagai suatu komunitas atau kelompok sosial. Kelas didefinisikan berdasarkan peluang hidup dan peluang sosial dari suatu kelompok. Peluang-peluang tersebut bergantung pada harta yang mereka miliki atau pendapatan ekonominya dan juga harta benda miliknya.

5.2.2 Pengertian Kelas Sosial

Kelas sosial merujuk pada satu strata (lapisan) tertentu dalam sebuah stratafikasi sosial. Dengan kata lain, kelas sosial memiliki cakupan lebih sempit dari stratafikasi sosial, yaitu merupakan bagian dari stratafikasi sosial. Pada prinsipnya, kelas sosial didominasi karena adanya kelompok yang menguasai ekonomi dan pasar. Kelompok ini mempunyai tujuan dan gaya hidup yang sama, serta memiliki peluang hidup yang sama pula pada satu sistem dalam masyarakat. Jadi, kelas sosial terbentuk oleh adanya ukuran-ukuran kekayaan dan tingkatan pendapatan masing-masing individu.

Dalam bidang sosiologi, istilah kelas sosial lebih dikenal dibandingkan stratafikasi sosial. Istilah kelas sosial ini pertama kali diperkenalkan oleh penguasa Romawi kuno. Dikutip dari buku Dahrendorf (1986) berjudul *“Konflik dan Konflik Kelas dalam Masyarakat Industri”* menyebutkan bahwa tujuan diperkenalkannya istilah kelas sosial oleh penguasa Romawi kuno adalah untuk memperoleh suatu otoritas kelas sosial yang mereka miliki terhadap

kelas sosial yang lain, sehingga menjadi suatu kekuatan penuh dalam menguasai individu atau kelompok pada sebuah sistem struktur sosial pada saat itu.

Zaman feodalisme, istilah kelas sosial dipakai untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan besaran dan jenis pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, para ilmuwan Eropa di abad ke-18 menggunakan istilah kelas sosial dalam konteks status sosial atau kedudukan. Hal ini berarti bahwa makna kelas sosial dan status sosial dipandang sama oleh para ilmuwan tersebut.

Pada abad ke-19, istilah kelas sosial digunakan oleh Karl Marx dalam menganalisis kesenjangan sosial berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat. Gagasan yang dikemukakan oleh Karl Marx, sebagaimana dikutip oleh Jones (2010), adalah sebagai berikut:

“Semua perkembangan sosial, politik dan intelektual disebabkan karena adanya perubahan ekonomi dan bahkan semua tindakan manusia selalu dimotivasi oleh motif ekonomi, dan manusia membuat sejarah sendiri, tetapi bukan dalam kondisi pilihannya sendiri.

Melalui gagasannya tersebut, Karl Marx ingin menunjukkan bahwa secara langsung, kehidupan non-ekonomi mempengaruhi aktivitas produksi individu. Perubahan-perubahan ekonomi lah yang dapat memberikan kemampuan kepada manusia untuk memandang dunia sebagaimana adanya. Pada akhirnya kondisi perubahan sosial tersebut menjadi satu-satunya kemungkinan sebagai akibat perkembangan ekonomi. Meski pada kenyataannya revolusi harus dilakukan dengan tindakan politik, namun realisasi kebutuhannya hanya timbul sebagai konsekuensi ekonomi, meliputi pergeseran dari kesadaran semu ke kesadaran kelas. Oleh karena itu, keinginan untuk mengubah masyarakat hanya dapat tercipta sebagai akibat perubahan atas motivasi dari kebutuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendrof, R. 1986. Konflik dan Konflik Kelas dalam Masyarakat Industri. Penerbit PT. Rajawali, Jakarta. hlm. 95-96
- Dwinarwoko, J & B. Suyanto. 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Penerbit: Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Horton, Paul. B., Chester L. Hunt. 1984. Sosiologi. Edisi Keenam, Penerbit: PT. Gelora Aksara Pratama, Surabaya. hlm. 7.
- Wulansari, C. Dewi. 2009. Sosiologi Konsep dan Teori. Penerbit: PT. Refika Aditama. Bandung. hlm.103.

BAB 6

RELASI KEKUASAAN DAN WEWENANG DALAM SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh Muhammad Fadhli Fadhillah

6.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan bagian dari negara agraris yang dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada jumlah tenaga kerja informal di sektor pertanian bahwa selama tiga tahun berturut turut bahwa di tahun 2019 presentase 87,59%, 2020 di angka 88,57% dan 2021 88,43%. (BPS, 2021). Dari data tersebut menunjukkan bahwa rerata masyarakat Indonesia masih bekerja dengan mengandalkan di sektor agraria.

Dalam menjaga produktivitas lahan yang ada di Indonesia, diperlukan arah kebijakan berdasarkan dari kekuasaan dan wewenang kepada pemangku kepentingan yakni Pemerintah. Fungsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui atas kuasanya adalah menjamin ketersediaan pangan dan petani sebagai langkah strategis dalam pembangunan nasional. Indonesia memiliki lahan yang produktif dalam menjaga karakteristik wilayah bangsa sebagai negara agraris sehingga untuk yang menjadi salah satu unsur penting dalam memproduksi pangan adalah menjamin warga yang bekerja pada sektor pertanian adalah ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan serta hak kepemilikan atas lahan tersebut menjadi salah satu unsur penting serta faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Dalam pemanfaatan lahan perlu diarahkan pada kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang (Dardak, 2005).

Pada pandangan kekuasaan ini, relevansi kekuasaan meminjam kerangka pemikiran Foucault tentang Genealogi Kekuasaan atau *Power/Knowledge* (Foucalt, 1969a:64; Foucalt2002b:164).

Kuasa/kekuasaan harusnya menempatkan kepentingan aktor yang paling lemah untuk membangun ruang produktif beserta jaringannya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan (Ronny, 2018). Selain itu, menurut Foucault bahwa kekuasaan ada dimana mana yang dimana, bahwa semua orang memiliki hak untuk otoritas bukan pemegang kekuasaan semata karena setiap individu memiliki kekuasaan (Sarup, 2011:119). Kekuasaan merembes dari bawah bukan dari atas seperti pengertian struktural dan diciptakan setiap saat. Apabila ada kekuasaan maka saat itu juga akan ada resistensi akan kekuasaan tersebut.

Adapun dalam pandangan Max Weber, mengawalinya dengan konsep tentang Negara (*state*). Negara dalam pandangan Weber mempunyai alat atau sarana yang dimilikinya dalam hak untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada warganya. Menurut Weber *"the state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory"*. Selain itu, negara tidak penting untuk dilihat dari segi tujuannya namun lebih pada sarana apa yang dimilikinya.

Dalam pembahasan mengenai relevansi kekuasaan dan wewenang yang terjadi di setiap sektor khususnya di bidang pertanian menjadi landasan awal dalam menentukan arah strategis terutama dalam menjaga identitas bangsa sebagai negara agraris dalam memberikan draft kebijakan yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemanfaatan lahan sehingga produktif dalam mengelola terutama di sektor pertanian.

6.2 Indonesia dalam Identitas Agraris

Identitas yang melekat pada masyarakat Indonesia dan pengenalan ke negara lain bahwa negara Indonesia selalu dikaitkan negara agraris. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, Indonesia termasuk negara agraris terbesar ketiga setelah India dan China (Tambunan, 2012). Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia mencapai 4,5 % per tahunnya (Minot, dkk, 2015). Walaupun identitas pertanian ini menjadi keunggulan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam ketersediaan pangan namun sektor pertanian menjadi sektor

yang paling lambat dalam mengikuti perkembangan teknologi serta memiliki dampak negatif yang tinggi akibat iklim (Sukartini & Solihin, 2013).

Adapun menurut Badan Pusat Statistik Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, perhatian akan ketersediaan data sektor pertanian yang lengkap, akurat dan terkini sangat dibutuhkan sebagai acuan pemangku kebijakan yakni pemerintah maupun *stakeholder* lainnya dalam perencanaan perumusan kebijakan (BPS, 2018).

Secara sejarah pun, Indonesia adalah gambaran negeri yang subur dan Makmur, *gemah ripah loh jinawi*, tongkat ditanam pohon jadi pohon. Dalam sejarah kolonialisasi Belanda sejak kurun waktu sekitar abad ke 17 hingga awal abad ke 20 telah menciptakan dua kutub yang saling berlawanan, antara penjajah dan terjajah, pemilik modal dan petani, Eropa dan Pribumi dan sebagainya (Lailatussytukriah, 2015).

Masalah agraria adalah tema sentral dalam kajian historiografi di bekas-bekas koloni Eeropa. Periode kolonial di Asia Tenggara ditandai dengan hampir seluruh ketetapan mengenai biaya hidup dari pendapatan minimal, sementara itu disaat yang sama, komersialisasi ekonomi agraris selalu menghancurkan hampir seluruh bentuk-bentuk tradisional dari asuransi sosial (Scoot: 1976 dalam (Lailatussytukriah, 2015). Studi-studi lokal mengenai pemberontakan petani, juga menjadi grand tema yang sangat populer dalam perkembangan historiografi Indonesia. *The Peasant's Revolt of Banten in 1888 Its Conditions, Course and Sequel* yang ditulis oleh Sartono Kartodirjo (1966) yang dimana menceritakan mengenai bentuk-bentuk perlawanan lokal terhadap dominasi asing dalam sistem pertanian tradisional. *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Tahun 1850-1942* yang ditulis oleh Suhartono juga menjadikan masalah-masalah tentang ekonomi sebagai isu sentral dalam gerakan sosial politik di Indonesia. Para petani dalam hal ini tampil menjadi aktor dan kekuatan baru dalam gerakan perlawanan melawan kekuasaan asing. Penjajahan yang dilakukan pada masa Kolonial Belanda selama 3,5 abad yang berhasil mengeruk hasil pertanian yang ada di Indonesia menjadi sasaran

utama dalam pencarian bahan pangan untuk kebutuhan bangsa negara penjajah. Tak hanya belanda, Inggris, Portugis dan negara Jepang pun tak luput dari bagian kompetisi dalam melakukan misi mengeruk potensi pangan di Indonesia sehingga adapun bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan terutama Petani Indonesia dalam mempertahankan komoditas pangan di dalam negeri. Contoh dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Petani Indonesia dalam mempertahankan komoditas pangan di Indonesia seperti pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1830, dimana konsep tanam paksa yang dilakukan oleh Van Den Bosch dalam tujuan mengeruk hasil pangan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan tenaga manusia seperti buruh tani lokal untuk kepentingan Industri dan menjual dengan harga pasti serta keuntungan yang diambil secara penuh oleh pemerintah Kolonial Belanda. Melihat ketimpangan yang dilakukan oleh Hindia Belanda, maka dilakukan pemberontakan para petani di Indonesia yang menjadi dasar titik kulminasi dari politik agraria Pemerintah Hindia Belanda.

Selain itu, hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam kegiatan Survei Pertanian antar Sensus 2018 yang dimana pertanian di Indonesia di bagi ke beberapa klasifikasi pertanian seperti Padi, Palawija, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Budidaya Ikan, Penangkapan Ikan, Tanaman Kehutanan dan Kehutanan Lainnya. Adapun Jumlah RTUP (Rumah Tangga Usaha Pertanian) berdasarkan hasil dari Survei Pertanian 2018 yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Walaupun sektor pertanian ini memiliki kelemahan dalam penyesuaian perkembangan teknologi, akan tetapi diharapkan sektor ini bisa tetap menjadi andalan dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan unggulan dengan negara lain .

Menjaga identitas agraris di tengah industrialisasi menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan kerap muncul terutama dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri menunjukkan adanya masalah dalam perubahan struktural dalam perekonomian nasional. Kontribusi sektor industri, terus meningkat, sayangnya justru sektor pertanianlah yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Kemiskinan pekerja di bidang pertanian semakin parah, demikian juga kesenjangan antara sektor pertanian dan semakin industri yang semakin luas (Amalina and Asmara, 2009).

6.3 Kekuasaan dan Wewenang dalam Aspek Sosiologi

Kekuasaan merupakan menjadi salah satu kajian penting dalam memahami dan merumuskan fenomena sosial. Penentuan arah kebijakan dalam sektor manapun ditentukan atas dasar pemahaman penguasa dalam menentukan sikap yang bijak untuk kepentingan masyarakat secara luasnya. Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan ada dimana mana, pada aspek sosiologis bahwa semua individu memiliki hak untuk berkuasa dalam menentukan sikap. Kekuasaan menurut Foucault, bukan hanya berada di tangan pemangku kebijakan atau aparatur negara melainkan setiap individu memiliki kekuasaan. (Siregar, 2021). Akar dalam pondasi kekuasaan adalah kumpulan dari individu yang mempunyai persepsi yang sama dan berbeda yang dijelaskan oleh teori struktur fungsional bahwa akar kekuasaan berada di pucuk pimpinan yang mengendalikan lembaga pemerintahan.

Dalam bukunya yang berjudul *The History of Sexuality*, Foucault (1990:94-95), menjelaskan ada beberapa proposisi kekuatan yaitu :

1. Kekuasaan bukan milik seperti benda yang didapat, diraih, dipakai, atau sesuatu yang dapat digenggam atau dibagi. Kekuasaan tidak bisa diwariskan dan juga tidak bisa punah; dia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan sifatnya selalu mengalami pergeseran;

2. Kekuasaan bukan bersifat relasi struktural hierarkis. Kekuasaan bukan berdasarkan kelompok yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan ada dimana mana dan datang dari mana-mana.
3. Kekuasaan datang dari bawah. Dalam kekuasaan tidak ada lagi *distingsi binary opposition* karena kekuasaan itu mencakup keduanya.
4. Relasi kekuasaan sifatnya intensional dan non subjektif
5. Dimana ada kesuksesan, disitu ada anti kekuasaan (resistensi).

Berkaitan dengan kekuasaan, fokus perhatian Foucault bukan terhadap definisi kekuasaan maupun struktur sosial dan politik dalam suatu negara. Foucault lebih tertarik bagaimana mekanisme dan strategi kuasa serta bagaimana praktik kekuasaan itu dalam kehidupan masyarakat. Melalui praktik itu akan terlihat bagaimana sesuatu itu diterima menjadi kebenaran. Menurut Foucault kekuasaan berkaitan erat dengan pengetahuan tanpa kekuasaan (Lubis, 2014).

Kekuasaan menciptakan dan melahirkan objek pengetahuan baru, sebaliknya pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa memiliki pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan. Pengetahuan selalu melahirkan kekuasaan (Siregar, 2021). Dalam pandangan Foucault ini, kekuasaan bukan menjadi alat instrumen untuk berkuasa dimana memutuskan secara sepihak, mementingkan kepentingan golongan tertentu dan menjadi arah kekuatan baru dalam berkuasa melainkan untuk melahirkan masyarakat produktif sehingga melahirkan inovasi dan pengetahuan baru bagi perkembangan suatu bangsa.

Pandangan lain dalam kekuasaan pun diutarakan oleh Max Weber. Istilah yang dikenal dalam menginterpretasikan kekuasaan adalah konsep *verstehen* (Jerman, berarti pemahaman). Pengembangan dalam *verstehen* bagian dari sosiologi interpretatif yang mengajarkan bahwa dunia sosial berbeda dengan dunia alam yang harus dimengerti suatu penyelesaian secara terlatih dari manusia sebagai subyek yang aktif dan pembentukan dunia ini sebagai sesuatu yang mempunyai makna dan dapat diperhitungkan atau dimengerti dengan jelas. Maka menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan

pemahaman interpretative. Begitupun dengan kekuasaan, bahwa seorang penguasa harus lebih dalam menganalisis dan mendeskripsikan masyarakat tidak sekedar soal yang tampak saja. Analisis dan deskripsi tentang masyarakat harus diinterpretasi sedemikian rupa agar penjelasan tentang individu dan masyarakat tidak keliru (Agung, 2016).

Selain itu, kekuasaan pun tidak dipandang sebagai sesuatu yang bernilai baik atau buruk. Karena kekuasaan pun bukan hanya persoalan nilai, namun adanya kekuasaan merupakan bagian unsur penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Setiap kita berkelompok, baik dalam berkeluarga, membentuk suatu kelompok maupun masyarakat harus melahirkan kekuasaan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Adanya kekuasaan juga tergantung pada pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain menerima pengaruh itu, dengan rela atau secara terpaksa (Munir, 2019).

Selain itu, pandangan Weber dalam melahirkan kekuasaan dibentuk atas dasar negara. Adapun pandangan Weber dalam peran negara dalam kekuasaan ini adalah *"the state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory"*. Negara menjadi hak untuk melegitimasi kekuasaan yang diatur kedalam suatu regulasi sehingga secara suka tidak suka masyarakat yang terlibat pun harus patuh pada kuasa tersebut.

Pandangan tersebut jelas menjadi hak yang harus dipaksakan dan menjalankan perintah dari kuasa tersebut sehingga berbeda dengan pandangan Foucault bahwa individu pun mempunyai hak yang sama dalam kekuasaan tersebut. Namun selain kekuasaan, adapun instrumen dalam mengatur kekuasaan tersebut adalah otoritas/wewenang. Otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh seorang pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi (Husaini, Husman, 2014).

Adapun klasifikasi dalam pembagian otoritas, Max Weber mengidentifikasi beberapa tipe hubungan sosial yang terwujud dalam struktur otoritas yang mapan berdasarkan tindakan-tindakan sosial

yang dilakukan bawahan terhadap perintah seseorang yang memiliki otoritas. Adapun klasifikasi otoritas di bagi kedalam sebagai berikut :

1. Otoritas tradisional merupakan bentuk wewenang yang berdasarkan pada kesakralan suatu tradisi tertentu yang menyebabkan individu patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pihak pemilik otoritas. Otoritas tradisional masih relevan digunakan pada sistem pemerintahan monarki / kerajaan yang dimana pemimpin di wariskan pada tahta keluarga kerajaan.
2. Otoritas Kharismatik merupakan bagian dari kualitas pemimpin secara pribadi. Penilaian seseorang menjadi landasan kelayakan menjadi seorang pemimpin. Negara demokrasi menjadi pengambil konsep dalam otoritas kharismatik tersebut dalam menentukan kelayakan seseorang dalam menjadi pemimpin di wilayah tersebut.
3. Otoritas Rasional merupakan bagian dari otoritas legal formal. Otoritas tersebut sering digunakan pada aparaturnya pemerintah yang berkuasa atas dasar promosi kenaikan jabatan dengan dinilai dari beberapa aspek kelayakan. Otoritas tersebut pun bisa dijalankan secara bersama-sama dengan masyarakat sehingga dalam menentukan keputusan bisa di sepakati baik secara musyawarah dengan masyarakat maupun atas kesepakatan yang telah dibuat

6.4 Relasi Kekuasaan dan Wewenang dalam Sektor Pertanian di Indonesia

Fenomena industrialisasi di Indonesia telah menyebabkan perubahan terutama dalam sektor pertanian merupakan bagian dari proses transformasi struktural. Seperti istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi *agregat demand*, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), *agregat supply* (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Amalina and Asmara, 2009). Pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya transformasi struktur terutama dalam bidang

pertanian yang beralih dalam penggunaan industri. Kontribusi sektor pertanian yang semakin kecil tidak diikuti dengan menurunnya pangsa tenaga kerja sektor pertanian masih sebesar 42,3 juta orang (Bappenas, 2006).

Dalam pandangan perubahan tersebut, seringkali petani berharap pemerintah sebagai hak preogratif dalam kuasa tersebut memberikan hak dan perlindungan atas lahan untuk garapan para petani. *Gap* yang terjadi antara petani dan negara jika tidak memberikan otoritas berupa hak keadilan bagi para petani terutama dalam perkembangan industrialisasi yang secara terpaksa lahan agraris mereka hilang demi kepentingan pemodal.

Menurut pendapat Moore (Ruman and Gea, 2010) mengenai konflik dalam hubungannya dengan transisi dari masyarakat agrarian menjadi masyarakat industri. Moore mencatat bahwa ada tiga fase transisi masyarakat agrarian menjadi masyarakat industri dan berhubungan atas pola kekuasaan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut :

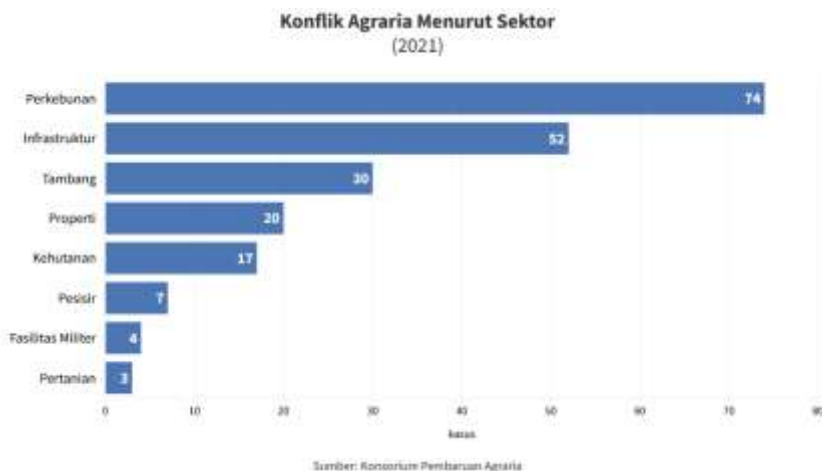
1. Ketika pemilik tanah feodal menjadi kapitalis yang menggantikan petani yang hidup pada dan mengerjakan tanah dalam perjanjian sewa menyewa dengan tenaga kerja yang disewakan, kemudian menjual produk mereka yang disewakan tenaga kerja ini kepada pasar sebagai nilai profit.
2. Fase dimana pemilik tanah memasuki pasar kapitalis untuk menjual produk mereka tetapi mereka tetap mempertahankan petani di tanah mereka, memaksa mereka untuk meningkatkan produktivitas melalui control penyewaan tradisional dan patronase yang ada dalam feodalisme. Di bawah kondisi ini para pemilik tanah mengintegrasikan diri mereka dengan birokrasi di bawah kekuasaan pemerintah dalam negara untuk mengontrol petani
3. Dimana pemilik tanah mengumpulkan penyewa dari petani yang menghasilkan secara langsung untuk pasar dengan harga yang sangat besar namun dengan pembayaran tunai kepada pemilik tanah. Berkurangnya harga barang yang dijual dipasar membuat para petani sadar mengenai eksploitasi terhadap diri mereka sendiri. Kesadaran ini dan emosi yang

muncul mengakibatkan para petani melakukan revolusi dan mosi tidak percaya terhadap penguasa.

Jauh sebelum Moore melihat transisi yang terjadi dalam masyarakat memainkan peran penting yang kondusif mendorong lahirnya konflik sosial. Max Weber (Ruman and Gea, 2010) sudah menunjukkan bahwa peran penting transisi ini. Menurut Weber konflik yang terjadi akibat perubahan trasisi agraris ke industri tidak hanya mencerminkan sistem yang tidak seimbang sebagaimana yang dapat dilihat dalam karya Karl Marx. Bagi Weber, persoalan yang penting adalah transisi dari satu bentuk masyarakat menjadi bentuk yang lainnya. Dari masyarakat yang didasarkan pada otoritas tradisional menjadi masyarakat yang diorganisir oleh otoritas yang legal rasional. Dalam transisi ini muncul kepemimpinan kharismatik yang memobilisasi subordinat.

Adapun penjelasan lain menurut Max Weber melalui bukunya yang berjudul “ *The Theory of Social and Economic Organization*” (Johnson, 1988) mengemukakan bahwa stabilitas keteraturan sosial yang abash atau tidak tergantung pada semata-mata kebiasaan saja atau pada kepentingan individu yang terlibat. Melainkan juga tergantung pada penerimaan individu akan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mendasari keteraturan-keteraturan hingga akhirnya sesuatu yang dihasilkan diterima atau tidak.

Sepanjang sejarah perkembangan pertanian di Indonesia, hingga tahun 2021 konflik agrarian tidak bisa dihindari akibat kepentingan pemodal dan penguasa dalam menjalankan keteraturan yang menguntungkan dari satu pihak tertentu. Menurut data Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 207 konflik agraria di Indonesia sepanjang 2021. Dari jumlah tersebut, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yakni 74 kasus. Lebih rinci lagi, 59 kasus atau 80% kasus tersebut terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.066 hektare. Selain itu, konflik di sektor infrastruktur berada di urutan berikutnya dengan 52 kasus. Kemudian, ada 30 konflik agraria yang terjadi di sektor pertambangan. Adapula 20 konflik agrarian yang terjadi di sektor properti. Konflik agraria di sektor kehutanan masing-masing sebanyak 17 kasus dan sisanya berada pada fasilitas militer dan sektor pertanian. Berikut grafil konflik agrarian yang terjadi di Indonesia



Peran kekuasaan sangatlah penting dalam menjamin kepastian pada masyarakat terutama dalam pengelolaan pertanian serta kelayakan dalam harga di pasar. Dalam paradigma pembangunan secara aspek sosiologis sebenarnya telah diketahui secara luas bahwa terdapat paradoks pembangunan (*development paradox*) yang sangat mengganggu. Negara-negara maju mengandalkan industri yang berteknologi tinggi sehingga secara pendapatan per kapita sangat besar umumnya memproteksi petaninya, yang *notabene* hanya sedikit jumlahnya. Sedangkan negara-negara miskin berbasis pertanian justru tidak ramah terhadap petaninya sendiri, walaupun sang petani merupakan mayoritas dan kontributor utama terhadap sistem sosial, politik dan perjalanan demokrasi negara (Arifin, 2006).

Pola kekuasaan dalam pemelintiran kebijakan atau intervensi pemerintah ke dalam sektor pertanian yang cukup rapi dan tidak transparan dengan tampilan ke publik menyampaikan tujuan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan pemerintah sebagai instrumen pembenaran untuk meningkatkan sektor pertanian. Akibatnya apa yang diharapkan tidak sesuai dan petani menjadi korban atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan konflik atas ketidakpuasan kepada pemerintah itu sendiri.

Seperti contoh pada pola kekuasaan dalam skala global sehingga berdampak signifikan atas kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi volatilitas harga pangan internasional yang menjadi implikasi serius pada ketahanan pangan di Indonesia. Konsep

ketahanan yang meliputi “ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang merata dan terjangkau”. Transmisi instabilitas harga komoditas pangan versus ketahanan pangan akan krusial untuk dikaji manakala fokus analisis dititikberatkan di level akar rumput pada Rumah Tangga Petani (RTP). Dualisme peran RTP sebagai produsen sekaligus konsumen pangan mengkonsekuensikan efek kesejahteraan seharusnya patut untuk dipertanyakan (Asmarantaka and Oktaviani, 2009).

Strategi koreksi seperti inilah yang harus segera dirinci pemerintah, apabila Indonesia ingin memajukan sektor pertanian serta meminimalisir konflik agrarian yang terjadi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Korelasi antara Pemerintah sebagai hak atas aturan untuk mengendalikan kekuasaan dengan petani sebagai peran utama dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Usulan-usulan untuk segera merumuskan *platform* atau *grand strategy* kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah banyak dikemukakan. Salah satunya adalah suatu strategi yang minimal mampu menyeimbangkan beberapa sasaran strategis yakni

1. Kesejahteraan petani dan masyarakat;
2. Ketahanan pangan dan efisiensi pertanian;
3. Proses dan strategi industrialisasi serta
4. Kerangka perdagangan Internasional (Arifin, 2000)

Persoalan strategi koreksi dan revisi ini menjadi lebih rumit, apabila negara-negara maju masih memproteksi atau memanjakan sektor pertaniannya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan *technical analysis* untuk menyeimbangkan beberapa sasaran yang menjadi dasar dalam menjaga Indonesia sebagai negara agrarian dan mengamalkan beberapa konsep Foucault untuk memberikan hak kepada individu di dalam suatu masyarakat untuk memberikan kesempatan dalam penggunaan kekuasaan atas dirinya dan kelompok masyarakat sekitar. Walaupun dalam konsep Max Weber bahwa kekuasaan telah di legitimasi oleh Negara dan pemerintah sebagai pengendali kekuasaanya namun sistem demokrasi ini menjadi dasar bahwa individu memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam penguasaan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M.N. 2016. 'Weber: "Nabi" Etika Protestan, Bapak Verstehen', *Pax Humana*, 3(1), pp. 057–066. Available at: <http://jurnalilmiah-paxhumana.org/index.php/PH/article/view/73/pdf>.
- Arifin, Bustanul. 2000. *Pembangunan Pertanian : Paradigma, Kinerja dan Opsi Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Indef
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*. Jakarta
- Amalina, D.H. and Asmara, A. 2009. 'Keterkaitan Antar Sektor Pertanian Dan Industri Pengolahan Di Indonesia', *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 3(2), pp. 69–80.
- Asmarantaka, R.W. and Oktaviani, R. 2009. 'Gejolak Harga Komoditas Pangan Internasional: Dampak Dan Implikasi Kebijakan Bagi Ketahanan Pangan Indonesia', *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 3(1), pp. 36–49.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta : Gramedia
- Johnson, D.P. 1988. *The Brain-Mind Relation, Religious Evolution, and Forms of Consciousness Sociological Analysis*, Vol 49, No 1
- Karim, Mohammad. 2010. *Pemimpin Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam*. Malang : UIN Maliki Press
- Konsorium Pembangunan Agraria
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/konflik-agraria-paling-banyak-terjadi-di-sektor-perkebunan>. diakses 27 Agustus 2022
- Lailatussyukriah. 2015. 'Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris', *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), pp. 1–8.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014b. *Postmodernisme : Teori dan Metode*. Jakarta : Rajawali Press
- Munir, A. 2019. 'Power and Authority di Pondok Pesantren: Potret Kepemimpinan Kiai dalam Lingkungan Multikultural', *JlEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 1(1), pp. 107–120. doi:10.35719/jieman.v1i1.11.
- Ruman, Y.S. and Gea, A.A. 2010. 'Konflik Pertanian antara Komunitas di Desa Watu Nggelek Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Ntt Tahun 1996 – Sekarang', *Humaniora*, 1(2), p.

284. doi:10.21512/humaniora.v1i2.2870.

Siregar, M. 2021. 'Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault', *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK*, 1(1), pp. 1–12. doi:10.30742/juispol.v1i1.1560.

Weber Max. 1947. *Theory of Social and Economic Organization*. New York : Oxford University Press

BIODATA PENULIS



Amruddin

Dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh)
Makassar Fakultas Pertanian

Lahir, besar dan bersekolah di Makassar. Penulis merupakan dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Fakultas Pertanian, dan 2014-2018 menjadi ketua program studi Agribisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Peternakan UNHAS, S2 di UNM Program Studi Sosiologi dan UIM Program Studi Agribisnis serta menyelesaikan S3 April 2021 di UNM Program Ilmu Sosiologi. Penulis gemar menulis, buku pertama yang diterbitkan adalah Kota Tanpa Maksiat (1995), Mengapa Memilih Pemimpin Islam (2001), beberapa buku kolaborasi diantaranya Dasar-Dasar Agribisnis (2020), Manajemen Agribisnis (2021) dan Dinamika Pembangunan Pedesaan dan Pertanian serta Sistem Pertanian Terpadu : Pertanian Masa Depan (2022). Sehari-hari sebagai dosen matakuliah, Dasar-Dasar Manajemen, Sosiologi Pertanian, Manajemen Agribisnis, Modal Sosial serta Manajemen Strategi Agribisnis.

BIODATA PENULIS



Dr. Ismiasih, S.TP., M.Sc

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

Dilahirkan di Bantul DIY pada tanggal 17 April. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta. Kemudian melanjutkan program studi S2 di Program Pasca Sarjana Ekonomi Pertanian UGM. Selanjutnya melanjutkan studi S3 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Pertanian di UGM.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap di Instiper Yogyakarta. Beberapa mata kuliah yang diajarkan di antaranya : Manajemen Bisnis Perkebunan, Ekonomi Bisnis Perkebunan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengendalian Mutu, Agroindustri, Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Metodologi Penelitian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Sosiologi dan Antropologi Perkebunan, serta Pemberdayaan Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Maman Haeruman Karmana

Penulis lahir di Bandung tanggal 14 September 1943. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Universitas Padjadjaran sejak tahun 1970 sampai tahun 2013. Purnabakti pada tahun 2013 dari Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad. Pada Tahun 2019, diangkat kembali sebagai tenaga pendidik di lingkungan Universitas Padjadjaran. Status saat ini adalah Guru Besar Emiritus. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Unpad, tahun 1972, kemudian S2 di North Dakota State University (NDSU) - USA lulus tahun 1982, dan S3 di State University of Ghent, Belgium, lulus tahun 1992. Penulis aktif menjadi tim pakar di beberapa lembaga pemerintah sampai saat ini, dan aktif sebagai pemerhati kebijakan dan isu strategis sosial ekonomi pertanian. Penulis banyak menulis artikel di media terkait isu-isu sosial ekonomi masyarakat, terutama lingkup Jawa Barat.

e-mail: maman_haeruman@yahoo.com

BIODATA PENULIS



Muhammad Fadhli Fadhillah S S.Sos

Strategic Program and Research Diferensia Foundation

Penulis lahir di Bandung tanggal 17 September 1993. Penulis merupakan peneliti dan konsultan pemberdaya program masyarakat di Diferensia Foundation. Menyelesaikan Program S1 pada Jurusan Sosiologi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan Program S2 Pada Jurusan Sosiologi di IPB University. Saat ini keseharian yang ditekuni adalah menulis, meneliti dan memberdayakan masyarakat.